

**EVALUASI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT
KAWASAN TRANSMIGRASI MINAHASA TENGGARA**



Penyusun :

DR. Sessu, M.Si

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
(UHAMKA)
JAKARTA
2009**

HALAMAN PENGESAHAN

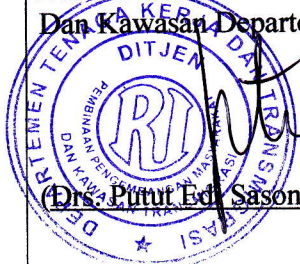
1.	Judul Penelitian	:	Evaluasi Sosial Ekonomi Masyarakat Kawasan Transmigrasi Minahasa Tenggara
2.	Bidang Penelitian	:	Sosial Ekonomi
	a. Nama Lengkap	:	DR. Andi Sessu, M.Si
	b. Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	c. NIP	:	131282637
	d. Disiplin Ilmu	:	Matematika / PLH / Ilmu Ekonomi
	e. Pangkat/Golongan	:	Pembina Tk. I / IV B
	f. Fakultas/Jurusan	:	FKIP / Matematika
	g. Alamat	:	Villa Inti Persada Blok C2 No. 52 Tangerang
	h. Telepon/Faks/E-mail	:	081525901727 / dr_andi_sessu@yahoo.com
4.	Lokasi Penelitian	:	Kab.Minahasa Tenggara Sulawesi Utara
5.	Pelaksanaan Penelitian	:	September – Desember 2008
6.	Biaya	:	Rp. 15.000.000,-

Jakarta, 30 April 2009


Menyetujui

Peneliti

Kasubdit Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat
Dit. Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat
Dan Kawasan Departemen Transmigrasi



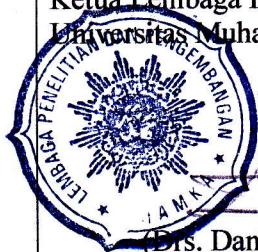
(Drs. Putut Edi Sasono, M.M)


(DR. Andi Sessu, M.Si)

Mengetahui,

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan,
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

Dekan Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan (FKIP) UHAMKA



(Drs. Daniel Fernandez, M.Si)



(Drs. Edi Sukardi, M.Pd)

KATA PENGANTAR

Sesungguhnya segala puji hanya kepada Allah kami memuji-Nya dan perlindungan, petunjuk serta ampunan kepada-Nya, dan kami juga memohon perlindungan kepadaNya dari kejahatan diri dan keburukan amal perbuatan kami sebab sesungguhnya barang siapa yang diberi kepada Allah, maka tidak seorangpun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada seorangpun yang dapat memberinya petunjuk.

Salam dan salawat semoga senantiasa dilimpahkan Allah SWT kepada Rasulullah Muhammad SAW, sosok yang kita teladani dalam kehidupan kita.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari kesempurnaan karya tulis ini. Demikian pula dalam penulisan karya tulis ini penulis banyak mendapat bantuan dan arahan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua yang telah memberikan bantuan dan arahnya .

Jakarta, Agustus 2009

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Kegiatan	3
1.3 Sasaran Kegiatan	4
1.4 Ruang Lingkup	4
1.5 Lokasi Kegiatan	7
1.6 Keluaran	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Konsepsi Pemberdayaan Masyarakat	9
2.2 Konsep Pengembangan Usaha	15
2.3 Model-Model Pengembangan Masyarakat	15
2.4 Pengetahuan dan Keterampilan Dalam Pengembangan Masyarakat	18
2.5 Perencanaan Pengembangan Masyarakat	20
2.6 Rencana Pengembangan Masyarakat	21
2.7 Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi	23
2.7.a Peningkatan peluang berusaha	23
2.7.b Peningkatan ruang usaha, jenis usaha dan waktu usaha	24
2.7.c Peningkatan modal usaha	25
2.8 Pengembangan Sosial Budaya	27
2.9 Pengembangan Mental Spiritual	31
2.10 Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Desa	31
2.11 Pembinaan Dalam Upaya Memberi Rasa Aman Masyarakat	34
BAB III GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	36
3.1 Sejarah Terbentuknya Provinsi Sulawesi Utara	36
3.2 Geografis	37
3.3 Demografi	39
3.4 Iklim dan Curah Hujan	40
3.5 Flora dan Fauna	40
3.6 Suku Bangsa, Bahasa dan Agama	42
3.7 Kependudukan	48

BAB IV PENDEKATAN DAN METODOLOGI	50
4.1 Pendekatan Input Output	50
4.2 Metodologi	53
 BAB V RENCANA KERJA	 67
5.1 Persiapan	67
5.2 Tahap Pelaksanaan Kajian	68
5.3 Tahap Analisis	69
5.4 Tahap Perumusan Hasil	70
5.5 Tahap Pelaporan	70
 BAB VI PELAKSANAAN PENELITIAN	 72
6.1 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	72
 BAB VII RENCANA PELAKSANAAN SURVEY	 81
7.1 Persiapan Survey dan Kajian Lapangan	81
7.2 Instrumen Pengumpulan Data	82
7.2.1 Pengamatan (Observasi)	82
7.2.2 Wawancara Mendalam	84
7.2.3 Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion)	85
7.2.4 Pembahasan/Diskusi di Daerah	87
7.3 Rencana Survey Institusional	88
7.4 Instrumen Pengumpulan Data	89
 BAB VIII IDENTIFIKASI DAN DESKRIPSI DATA	 113
8.1 Perkembangan Penduduk	113
8.2 Struktur Penduduk	115
8.3 Kepadatan Penduduk Desa	123
8.4 Mata Pencarian Penduduk Unit pemukiman Transmigrasi Kabupaten Minahasa Tenggara	124
8.5 Kondisi Usaha Ekonomi Khusus Usaha Tani	129
8.6 Kelembagaan Ekonomi	134
 BAB IX PEMBAHASAN	 136
9.1 Kependudukan dan Perkembangan Kependudukan	136
9.2 Fasilitas Umum	137
9.3 Sarana dan Prasarana	139
9.4 Mata Pencarian	142

BAB IX KESIMPULAN DAN SARAN	144
--	------------

10.1Kesimpulan	144
----------------------	-----

10.2Saran-saran	145
-----------------------	-----

Daftar Tabel

Tabel 3	Data Penduduk Menurut Kelompok Usia Produktif UPT Pisa	119
Tabel 4	Data Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin UPT Berlin	121
Tabel 5	Data Mata Pencaharian UPT Lowatag	124
Tabel 6	Data Mata Pencaharian UPT Pisa	125
Tabel 7	Data Mata Pencaharian UPT Suhuyon	126
Tabel 8	Data Mata Pencaharian UPT Betelen	128
Tabel 9	Komoditas Tanaman Pangan UPT Lowatag	129
Tabel 10	Komoditas Tanaman Perkebunan UPT Lowatag	129
Tabel 11	Komoditas Tanaman Buah-buahan UPT Lowatag	129
Tabel 12	Komoditas Tanaman Pangan UPT Suhuyon	130
Tabel 13	Komoditas Tanaman Perkebunan UPT Suhuyon	130
Tabel 14	Komoditas Tanaman Buah-buahan UPT Suhuyon	130
Tabel 15	Komoditas Tanaman Pangan UPT Pisa.....	131
Tabel 16	Komoditas Tanaman Perkebunan UPT Pisa.....	131
Tabel 17	Komoditas Tanaman Buah-buahan UPT Pisa	131
Tabel 18	Komoditas Tanaman Pangan UPT Betelen	132
Tabel 19	Komoditas Tanaman Perkebunan UPT Betelen	133
Tabel 20	Komoditas Tanaman Buah-buahan UPT Betelen	133

Daftar Gambar

Gambar 1	Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin UPT Lowatag	116
Gambar 2	Data Penduduk Menurut Kelompok Usia Produktif UPT Lowatag	117
Gambar 3	Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin UPT Lowatag	118
Gambar 4	Data Penduduk Menurut Kelompok Usia Produktif UPT Lowatag	119
Gambar 5	Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin UPT Suhuyon	120
Gambar 6	Data Penduduk Menurut Kelompok Usia Produktif UPT Suhuyon.....	121
Gambar 7	Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin UPT Betelen	122
Gambar 8	Data Penduduk Menurut Kelompok Usia Produktif UPT Betelen..	123

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses yang menjembatani antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan di masa mendatang. Oleh sebab itu untuk mencapai hasil yang diinginkan perlu rencana dan disusun sebelum melaksanakan suatu tindakan. Dalam pengertian manajemen perencanaan berarti proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Berdasarkan jangka waktunya perencanaan dapat dibagi menjadi jangka panjang, menengah dan pendek. Perencanaan teknis pengembangan masyarakat adalah uraian rencana kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi, baik dalam lingkup WPT maupun LPT yang perlu dilaksanakan untuk mencapai suatu sasaran dalam setiap tahapan, selanjutnya akan menjadi acuan pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi dan lingkungan permukiman transmigrasi. Penyusunan rencana teknis pengembangan masyarakat berisi berbagai rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pengembangan masyarakat untuk mencapai tahap pengembangan (*development stage*) dan tahap pematangan (*establishment stage*).

Adapun perencanaan memiliki arti penting, untuk:

1. Memberi arah yang lebih jelas pada tujuan yang ingin dicapai,

2. Merupakan alat bantu untuk melakukan pekerjaan agar lebih terorganisir, efisien dan efektif.
3. Merupakan alat bantu untuk mengukur seberapa jauh tujuan yang diinginkan tercapai, dan
4. Merupakan alat bantu melakukan koreksi atas pencapaian tujuan apabila terjadi penyimpangan.

Sebelum membuat perencanaan, perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja saat ini sebagai dampak dari perencanaan sebelumnya, serta menemukan dan menentukan gambaran masyarakat di kawasan transmigrasi yang diinginkan.

Sebagai gambaran masyarakat transmigran yang diinginkan secara umum adalah:

1. Masyarakat transmigran yang mampu, produktif, mandiri dan dapat mewujudkan intergrasi di lokasi permukiman transmigrasi, sehingga secara ekonomi, sosial dan budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.
2. Memiliki mental spritual yang baik, keahlian, keterampilan dan pengetahuan, serta memperoleh jamaninan kesempatan kerja dan kemudahan usaha.

Gambaran masyarakat transmigran yang diinginkan tersebut apabila dijabarkan lebih rinci akan dapat didekati dengan indikator seperti:

1. Tingkat pendapatan transmigran dapat mencapai minimal Rp. 3.000.000,- /tahun.
2. Mampu berintegrasi dengan desa sekitar.
3. Memiliki sara dan prasarana transportasi yang memadai.
4. Memiliki derajat pendidikan dan kesehatan yang memadai.

5. Memiliki inovasi dan motivasi serta tumbuh kemandiriannya.
6. Memiliki rasa aman

Peningkatan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi sebagaimana dimaksud di atas akan diwujudkan melalui peningkatan keahlian, keterampilan dan pengetahuan. Pembangunan kemandirian akan diwujudkan melalui jaminan ketersediaan kesempatan kerja dan peluang usaha dan pemberian kemudahan usaha.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, bahwa penyusunan rencana teknis pembinaan (*pemberdayaan*) masyarakat transmigrasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut, meliputi bidang ekonomi, sosial dan budaya, mental spritual dan kelembagaan pemerintah dan setiap bidang diberikan pendidikan dan pelatihan.

Agar sasaran pengembangan masyarakat di kawasan transmigrasi secara bertahap dapat diwujudkan, maka perlu disusun suatu perencanaan teknis pengembangan masyarakat.

1.2. Tujuan Kegiatan

Dengan memperhatikan aspek-aspek sosial budaya, ekonomi dan lingkungan strategis, maka tujuan kegiatan ini adalah:

- a. Menyusun rencana teknis pengembangan masyarakat di kawasan transmigrasi.

- b. Menyusun program tahunan pengembangan masyarakat di kawasan transmigrasi selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan tahapan pembinaan.

1.3. Sasaran Kegiatan

Sesuai dengan tujuan kegiatan tersebut, maka sasaran yang ingin dicapai adalah:

- a. Tersusunya rencana teknis pengembangan masyarakat di kawasan transmigrasi.
- b. Tersusunya program tahunan pengembangan masyarakat transmigran di kawasan transmigrasi selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan tahapan pembinaan.

1.4. Ruang Lingkup

Lingkup kegiatan perencanaan teknis pengembangan masyarakat meliputi beberapa tahapan:

a. Persiapan

- 1. Studi pustaka, dan pengumpulan data sekunder (hasil studi RTSP, hasil kaji ulang, hasil penelitian, dll)
- 2. Pembentukan tim kerja atau pengorganisasian

b. Pelaksanaan

- 1. Tahap Pelaksanaan Survey dan Pengumpulan Data

Survey instansional : Koordinasi ditingkat Provinsi dan Kabupaten dalam rangka pengumpulan data sekunder dari Dinas Propinsi

dan kabupaten terkait. Seperti Dinas transmigrasi, Bappeda, BPS dan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Kajian Lapangan : difokuskan pengumpulan data di kawasan transmigrasi sebagai unit analisis, yang akan meliputi kegiatan pengamatan (observasi), Wawancara Mendalam, dan Fokus Group Discussion (FGD) dengan nara sumber, informan dan responden terpilih. dalam kajian lapangan ini partisipasi aktif masyarakat sangat diharapkan sehingga dapat digali data primer yang akurat tentang persepsi, pemahaman, harapan masyarakat dan segenap stakeholders.

2. Tahap Identifikasi masalah, potensi dan kebutuhan

Dalam analisis kebutuhan masyarakat ada beberapa teknik yang dapat digunakan antara lain dengan melihat kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman (SWOT). Dalam proses identifikasi masyarakat harus dilibatkan secara aktif, agar mereka dapat merasakan bahwa permasalahan yang sedang dibicarakan merupakan permasalahan mereka sendiri.

Teknis pengumpulan informasi dapat dilakukan secara individual melalui tokoh-tokoh masyarakat ataupun anggota masyarakat tertentu. Atau dapat pula dilakukan secara berkelompok, misalnya, dengan menggunakan metode diskusi kelompok terfokus dan curah pendapat dll. Teknik tersebut harus dilakukan secara bersamaan untuk mendapatkan gambaran kondisi masyarakat yang sedang dikaji.

Kegiatan identifikasi dan penilaian masalah, potensi dan kebutuhan masyarakat dapat dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan UPT, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pengembangan usaha yang lain, seperti Tokoh Masyarakat, pelaku bisnis, LSM serta aparat Dinas/Instansi terkait.

c. Tahap Perencanaan Program

Pada tahap ini harus dilakukan komunikasi dengan melibatkan masyarakat untuk diajak berpikir bagaimana cara mengatasi masalah yang dihadapi. Masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan. Rancangan program yang disusun harus berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan sekedar keinginan.

Program dan kegiatan yang akan dikembangkan harus berorientasi pada kemandirian masyarakat dan bermanfaat dalam jangka panjang.

d. Tahap Formulasi Kegiatan

Pada tahap ini masyarakat dilibatkan dalam merumuskan dan menentukan program yang akan disusun untuk mengatasi permasalahan yang ada. Selanjutnya, rumusan program yang disusun tersebut harus menjadi rencana kerja masyarakat. Penentuan program harus didasarkan pada kemampuan dan ketersediaan sumberdaya setempat. Apabila ketersediaan sumberdaya setempat tidak memadai, maka usulan program harus direvisi, sehingga secara teknis dapat dilaksanakan.

1.5. Lokasi Kegiatan

Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat Di Kawasan Transmigrasi dalam kegiatan ini akan difokuskan dan disusun untuk satu lokasi kawasan transmigrasi, di Provinsi Sulawesi Utara.

1.6. Keluaran

Cukupan masukan, proses dan keluaran yang akan dihasilkan dalam kegiatan perencanaan teknis pengembangan masyarakat, akan difokuskan untuk mendalami hal-hal yang berkaitan dengan 5 (lima) daya sebagai dari tugas pokok dan fungsi Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan. adapun kelima daya dimaksud sebagai berikut :

- (1) Kebutuhan bidang ekonomi ;
- (2) Kebutuhan bidang sosial budaya;
- (3) Kebutuhan bidang mental spritual ;
- (4) Kebutuhan bidang kelembagaan; dan
- (5) Kebutuhan bidang keamanan.

Selanjutnya keluaran tersebut disusun dan dikemas dalam bentuk dokumen rumusan yang menjadi keluaran utama dari kegiatan ini, yaitu :

- a. Rencana Teknis Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi.
Propinsi Sulawesi Utara.
- b. Program Tahunan Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi,
Propinsi Sulawesi Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses kepada sumberdaya pembangunan didorong untuk makin mandiri dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Dalam proses ini masyarakat dibantu untuk mengkaji kebutuhan, masalah dan peluang dalam pembangunan yang dimilikinya sesuai dengan lingkungan sosial ekonomi perikehidupan mereka sendiri.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses perbaikan yang ditujukan untuk memberikan kemampuan kepada siapapun untuk mampu melakukan sesuatu yang bermanfaat. Salah satu upaya untuk mempercepat proses perbaikan dalam pemberdayaan masyarakat adalah pendampingan. Pendampingan sebagai suatu konsep berkembang dengan adanya kesadaran baru bahwa masyarakat bukanlah pihak yang tidak tahu dan tidak mau maju sebaliknya saat ini mulai dikenali bahwa masyarakat adalah pihak yang mau, memiliki pengetahuan lokal, mempunyai potensi besar serta kearifan tradisional.

Pendampingan pada dasarnya merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi pada proses pengambilan keputusan berbagai kegiatan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, membangun kemampuan dalam

meningkatkan pendapatan, melaksanakan usaha yang berskala bisnis serta mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang partisipatif.

2.1. Konsepsi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan suatu konsep yang menjelaskan berbagai upaya untuk memperkuat posisi seseorang untuk melalui penumbuhan kesadaran dan kemampuan individu yang bersangkutan untuk mengidentifikasi persoalan yang dihadapi dan memikirkan langkah-langkah mengatasinya. Inti dari kegiatan pemberdayaan adalah motivasi untuk memahami kondisi dan situasi kerja sehari-hari serta menumbuhkan kemampuan dan keberanian mereka untuk bersikap kritis terhadap kondisi yang mereka hadapi, sehingga kuncinya adalah membangun partisipasi.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk mempersiapkan masyarakat dengan memperkuat kelembagaan masyarakat agar mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Implementasi Pemberdayaan itu sendiri sangat bervariasi dari waktu ke waktu. Ada dua macam cara yang digunakan, yaitu gaya partisipasi dengan berbasis hubungan pertemanan dan gaya yang cenderung top down (dari atas ke bawah) berbasis hubungan yang bersifat paternalistik.

Pada masa lalu Program pemberdayaan masyarakat, biasanya dibuat di tingkat Pusat (atas) dan dilaksanakan oleh Instansi Propinsi dan Kabupaten (top down). Masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut tidak diberikan pilihan dan kesempatan untuk memberi masukan. Hal ini dilakukan untuk mencapai efisiensi dalam pembangunan dan menganggap masyarakat tidak

mempunyai kemampuan untuk menganalisa kondisi dan merumuskan persoalan serta kebutuhan-kebutuhannya. Dalam pandangan ini masyarakat ditempatkan pada posisi yang membutuhkan bantuan dari luar.

Program yang dilakukan dengan pendekatan dari atas ke bawah semacam ini hasilnya tidak seperti yang diharapkan dan kurang memberi manfaat kepada masyarakat. Bantuan yang diberikan lebih banyak menciptakan ketergantungan yang pada gilirannya akan lebih menyusahkan masyarakat dari pada menolongnya, karena bantuan tersebut kadang-kadang tidak sesuai kebutuhan dan prioritas yang diinginkan masyarakat.

Program pemberdayaan masyarakat saat ini memposisikan masyarakat sebagai pelaku utama, sehingga masyarakat itu sendiri yang menentukan kebutuhan dan prioritas yang diinginkannya.

Sasaran utama dari pemberdayaan masyarakat adalah membuka akses bagi kaum yang terpinggirkan dalam pembangunan, termasuk kaum perempuan dan golongan tidak berdaya lainnya. Untuk itu pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang berjalan secara terus menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat, menganalisa kondisi dan potensi serta masalah-masalah yang dihadapi.

Untuk menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat perdesaan, pada dasarnya harus memiliki 3 (tiga) komponen yaitu Pertama, pemihakan dan pemberdayaan masyarakat, kedua pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan di daerah yang mengembangkan peran serta pemerintah dan ketiga terjadinya modernisasi

melalui pemantapan pada perubahan struktur ekonomi dan budaya yang bersumber pada peran masyarakat lokal.

Sedangkan kebijakan pemberdayaan masyarakat secara umum dapat di kelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu pertama kebijakan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi rakyat, kedua kebijaksanaan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran dan ketiga kebijakan khusus yang menjangkau masyarakat miskin melalui upaya khusus.

Pemberdayaan masyarakat khususnya dalam pengembangan ketahanan pangan berada pada tiga level, yaitu : individu, komunitas regional (perluasan jaringan dan kemitraan terjangkau oleh komunitas tetapi sering tidak tersentuh oleh negara), dan negara. Pada tingkat individu, pemberdayaan dapat dikatakan berhasil manakala mampu mengembangkan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak. Pada tingkat komunitas, dampak dari pemberdayaan adalah berkembangnya nilai-nilai sosial dan struktur sosial baru dan kelembagaan yang makin efektif memenuhi kebutuhan komunitas. Sementara pada tingkat negara ditandai dengan terjadinya kebijakan baru yang mengubah pola hubungan dan distribusi kekuasaan, yang lebih berpihak pada masyarakat/rakyat.

Khusus untuk tingkat individu dan komunitas, agar tercapai efektivitas pemberdayaan masyarakat maka diperlukan peran pendamping yang diharapkan dapat berkontribusi dalam menunjang keberhasilan program Pemberdayaan Masyarakat, dengan berperan dengan fasilitator pembangunan masyarakat.

Pengembangan Masyarakat (PM)³ memiliki sejarah panjang dalam praktek pekerjaan sosial (Payne, 1995; Suharto, 1997). Sebagai sebuah metode pekerjaan sosial, PM memungkinkan pemberi dan penerima pelayanan terlibat dalam proses perencanaan, pengawasan dan evaluasi. PM meliputi berbagai pelayanan sosial yang berbasis masyarakat mulai dari pelayanan preventif untuk anak-anak sampai pelayanan kuratif dan pengembangan untuk keluarga yang berpendapatan rendah.

Meskipun PM memiliki peran penting dalam pekerjaan sosial, PM belum sepenuhnya menjadi ciri khas praktek pekerjaan sosial. PM masih menjadi bagian dari kegiatan profesi lain, seperti perencana kota dan pengembang perumahan. PM juga masih sering dilakukan oleh para voluntir dan aktivis pembangunan yang tidak dibayar. Telah terjadi perdebatan panjang mengenai apakah PM dapat dan harus didefinisikan sebagai kegiatan profesional. Yang jelas, PM memiliki tempat khusus dalam khazanah pendekatan pekerjaan sosial, meskipun belum dapat dikategorikan secara tegas sebagai satu-satunya metode milik pekerjaan sosial (Mayo, 1998).

PM memiliki fokus terhadap upaya menolong anggota masyarakat yang memiliki kesamaan minat untuk bekerja sama, mengidentifikasi kebutuhan bersama dan kemudian melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. PM seringkali diimplementasikan dalam bentuk (a) proyek-proyek pembangunan yang memungkinkan anggota masyarakat memperoleh dukungan dalam memenuhi kebutuhannya atau melalui (b) kampanye dan aksi sosial yang

memungkinkan kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh pihak-pihak lain yang bertanggungjawab (Payne, 1995:165).

PM (community development) terdiri dari dua konsep, yaitu “pengembangan” dan “masyarakat”. Secara singkat, pengembangan atau pembangunan merupakan usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Bidang-bidang pembangunan biasanya meliputi beberapa sektor, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial-budaya. Masyarakat dapat diartikan dalam dua konsep, yaitu (Mayo, 1998:162):

Masyarakat sebagai sebuah “tempat bersama”, yakni sebuah wilayah geografi yang sama. Sebagai contoh, sebuah rukun tetangga, perumahan di daerah perkotaan atau sebuah kampung di wilayah pedesaan.

Masyarakat sebagai “kepentingan bersama”, yakni kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas. Sebagai contoh, kepentingan bersama pada masyarakat etnis minoritas atau kepentingan bersama berdasarkan identifikasi kebutuhan tertentu seperti halnya pada kasus para orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus (anak cacat fisik) atau bekas para pengguna pelayanan kesehatan mental.

Istilah masyarakat dalam PM biasanya diterapkan terhadap pelayanan-pelayanan sosial kemasyarakatan yang membedakannya dengan pelayanan-pelayanan sosial kelembagaan. Pelayanan perawatan manula yang diberikan di rumah mereka dan/atau di pusat-pusat pelayanan yang terletak di suatu masyarakat merupakan contoh pelayanan sosial kemasyarakatan. Sedangkan perawatan manula di sebuah rumahsakit khusus manula adalah contoh pelayanan

sosial kelembagaan. Istilah masyarakat juga sering dikontraskan dengan “negara”. Misalnya, “sektor masyarakat” sering diasosiasikan dengan bentuk-bentuk pemberian pelayanan sosial yang kecil, informal dan bersifat bottom-up. Sedangkan lawannya, yakni “sektor publik”, kerap diartikan sebagai bentuk-bentuk pelayanan sosial yang relatif lebih besar dan lebih birokratis.

PM yang berbasis masyarakat seringkali diartikan dengan pelayanan sosial gratis dan swadaya yang biasanya muncul sebagai respon terhadap melebarnya kesenjangan antara menurunnya jumlah pemberi pelayanan dengan meningkatnya jumlah orang yang membutuhkan pelayanan. PM juga umumnya diartikan sebagai pelayanan yang menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih bernuansa pemberdayaan (empowerment) yang memperhatikan keragaman pengguna dan pemberi pelayanan.

Dengan demikian, PM dapat didefinisikan sebagai metoda yang memungkinkan orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya (AMA, 1993). Menurut Twelvetrees (1991:1) PM adalah “the process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective actions.” Secara khusus PM berkenaan dengan upaya pemenuhan kebutuhan orang-orang yang tidak beruntung atau tertindas, baik yang disebabkan oleh kemiskinan maupun oleh diskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, jender, jenis kelamin, usia, dan kecacatan.

2.2. Konsep Pengembangan Usaha

Dalam Konsep Pengembangan Usaha Pertanian pada dasarnya harus dikaitkan antara pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal dengan kondisi eksisting sosial ekonomi masyarakat serta memperhatikan keterkaitan tersebut. Dengan demikian dalam perencanaan dan pemanfaatannya harus berlandaskan pada peningkatan produktifitas sumber daya lahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan petani secara berkesinambungan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Konsep pengembangan usaha di UPT ini adalah :

1. Pengembangan komoditas unggulan daerah/potensial daerah sesuai dengan keunggulan komparatif/potensi yang dimiliki
2. Penyusunan model-model agribisnis plan dengan mempertimbangkan kemampuan petani
3. Kerjasama/kemitraan dengan investor untuk pengembangan komoditas yang memerlukan investasi tinggi
4. Menyusun informasi Bisnis
5. Pembentukan suatu wadah organisasi petani yang kuat dan mengarah kepada organisasi/bisnis bersama yang dapat mengelola, merencanakan dan mengorganisir kegiatan on farm hingga *off farm*

2.3. Model-Model Pengembangan Masyarakat

Secara teoretis, PM dapat dikatakan sebagai sebuah pendekatan pekerjaan sosial yang dikembangkan dari dua perspektif yang berlawanan, yakni aliran kiri

(sosialis-Marxis) dan kanan (kapitalis-demokratis) dalam spektrum politik. Dewasa ini, terutama dalam konteks menguatnya sistem ekonomi pasar bebas dan “swastanisasi” kesejahteraan sosial, PM semakin menekankan pentingnya swadaya dan keterlibatan informal dalam mendukung strategi penanganan kemiskinan dan penindasan, maupun dalam memfasilitasi partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Secara garis besar, Twelvetrees (1991) membagi perspektif PM ke dalam dua bingkai, yakni pendekatan “profesional” dan pendekatan “radikal”. Pendekatan profesional menunjuk pada upaya untuk meningkatkan kemandirian dan memperbaiki sistem pemberian pelayanan dalam kerangka relasi-relasi sosial. Sementara itu, berpijak pada teori struktural neo-Marxis, feminisme dan analisis anti-rasis, pendekatan radikal lebih terfokus pada upaya mengubah ketidakseimbangan relasi-relasi sosial yang ada melalui pemberdayaan kelompok-kelompok lemah, mencari sebab-sebab kelemahan mereka, serta menganalisis sumber-sumber ketertindasannya.

Sebagaimana diungkapkan oleh Payne (1995:166), “This is the type of approach which supports minority ethnic communities, for example, in drawing attention to inequalities in service provision and in power which lie behind severe deprivation.” Seperti digambarkan oleh Tabel 1, dua pendekatan tersebut dapat dipecah lagi kedalam beberapa perspektif sesuai dengan beragam jenis dan tingkat praktek PM. Sebagai contoh, pendekatan profesional dapat diberi label sebagai perspektif (yang) tradisional, netral dan teknikal. Sedangkan pendekatan radikal

dapat diberi label sebagai perspektif transformasional (Dominelli, 1990; Mayo, 1998).

Berdasarkan perspektif di atas, PM dapat diklasifikasikan kedalam enam model sesuai dengan gugus profesional dan radikal (Dominelli, 1990; Mayo, 1998). Keenam model tersebut meliputi: Perawatan Masyarakat, Pengorganisasian Masyarakat dan Pembangunan Masyarakat pada gugus profesional; dan Aksi Masyarakat Berdasarkan Kelas Sosial, Aksi Masyarakat Berdasarkan Jender dan Aksi Masyarakat Berdasarkan Ras (Warna Kulit) pada gugus radikal.

1. Perawatan Masyarakat merupakan kegiatan volunteer yang biasanya dilakukan oleh warga kelas menengah yang tidak dibayar. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi kesenjangan legalitas pemberian pelayanan.
2. Pengorganisasian Masyarakat memiliki fokus pada perbaikan koordinasi antara berbagai lembaga kesejahteraan sosial.
3. Pembangunan Masyarakat memiliki perhatian pada peningkatan keterampilan dan kemandirian masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
4. Aksi Masyarakat Berdasarkan Kelas bertujuan untuk membangkitkan kelompok-kelompok lemah untuk secara bersama-sama meningkatkan kemampuan melalui strategi konflik, tindakan langsung dan konfrontasi.
5. Aksi Masyarakat Berdasarkan Jender bertujuan untuk mengubah relasi-relasi-relasi sosial kapitalis-patriakal antara laki-laki dan perempuan, perempuan dan negara, serta orang dewasa dan anak-anak.

6. Aksi Masyarakat Berdasarkan Ras (Warna Kulit) merupakan usaha untuk memperjuangkan kesamaan kesempatan dan menghilangkan diskriminasi rasial.

Tabel 1: Dua Perspektif Pengembangan Masyarakat

Perspektif	Tujuan/Asumsi
Profesional (Tradisional, Netral Teknikal)	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan inisiatif masyarakat, termasuk kemandirian. • Memperbaiki pemberian pelayanan sosial dalam kerangka relasi sosial yang ada.
Radikal (Transformasional)	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan inisiatif masyarakat, memperbaiki pemberian pelayanan sosial. • Pemberdayaan masyarakat guna mencari akar penyebab ketertindasan dan diskriminasi. • Mengembangkan strategi dan membangun kerjasama dalam melakukan perubahan sosial sebagai bagian dari upaya mengubah relasi sosial yang menindas, diskriminatif, dan eksploitatif.

Sumber: diadaptasi dari Mayo (1998:166)

Tabel 2: Model-Model Pengembangan Masyarakat

Perspektif	Model
Profesional (Tradisional, Netral, Teknikal)	Perawatan Masyarakat, Pengorganisasian Masyarakat Pembangunan Masyarakat
Radikal (Transformasional)	Aksi Masyarakat Berdasarkan Kelas Aksi Masyarakat Berdasarkan Jender Aksi Masyarakat Berdasarkan Ras (Warna Kulit)

Sumber: diadaptasi dari Mayo (1998:167)

2.4. Pengetahuan dan Keterampilan Dalam Pengembangan Masyarakat

Model-model PM perlu dibangun berdasarkan perspektif alternatif (baik profesional maupun radikal) yang secara kritis mampu memberikan landasan teoritis dan pragmatis bagi praktek pekerjaan sosial. Apapun perspektif dan model yang digunakan, pekerja sosial perlu meningkatkan perangkat pengetahuan, teknik

dan keterampilan profesionalnya yang saling melengkapi. Secara umum, beberapa bidang yang harus dikuasai adalah:

- Engagement (dengan beragam individu, kelompok, dan organisasi).
- Assessment (termasuk assessment kebutuhan dan profile wilayah).
- Penelitian (termasuk penelitian aksi-partisipatif dengan masyarakat).
- Groupwork (termasuk bekerja dengan kelompok pemecah masalah maupun kelompok-kelompok kepentingan).
- Negosiasi (termasuk bernegosiasi secara konstruktif dalam situasi-situasi konflik).
- Komunikasi (dengan berbagai pihak dan lembaga).
- Konseling (termasuk bimbingan dan penyuluhan terhadap masyarakat dengan beragam latar kebudayaan)
- Manajemen sumber (termasuk manajemen waktu dan aplikasi-aplikasi untuk memperoleh bantuan).
- Pencatatan dan pelaporan.
- Monitoring dan evaluasi.

Pekerja sosial juga memerlukan pengetahuan mengenai kebijakan sosial, sistem negara kesejahteraan (welfare state), dan hak-hak sosial masyarakat, termasuk pengetahuan-pengetahuan khusus dalam bidang-bidang dimana praktek pekerjaan sosial beroperasi, seperti: kebijakan kesejahteraan sosial dan kesehatan, praktek perawatan masyarakat, peraturan dan perundang-undangan perlindungan anak, serta perencanaan sosial termasuk perencanaan wilayah (perkotaan dan

pedesaan) dan perumahan. Sebagai tambahan, seperti diungkapkan oleh Mayo (1994:74), pekerja sosial perlu memiliki pengetahuan mengenai:

The socio-economic and political backgrounds of the areas in which they are to work, including knowledge and understanding of political structures, and of relevant organisations and resources in the statutory, voluntary and community sectors. And they need to have knowledge and understanding of equal opportunities policies and practice, so that they can apply these effectively in every aspect of their work.

2.5. Perencanaan Pengembangan Masyarakat

Pelaksanaan PM dapat dilakukan melalui penetapan sebuah program atau proyek pembangunan. Secara garis besar, perencanannya dapat dilakukan dengan mengikuti 6 langkah perencanaan.

1. Perumusan masalah. PM dilaksanakan berdasarkan masalah atau kebutuhan masyarakat setempat. Beberapa masalah yang biasanya ditangani oleh PM berkaitan dengan kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, pemberantasan buta huruf, dll. Perumusan masalah dilakukan dengan menggunakan penelitian (survey, wawancara, observasi), diskusi kelompok, rapat desa, dst.
2. Penetapan program. Setelah masalah dapat diidentifikasi dan disepakati sebagai prioritas yang perlu segera ditangani, maka dirumuskanlah program penanganan masalah tersebut.
3. Perumusan tujuan. Agar program dapat dilaksanakan dengan baik dan keberhasilannya dapat diukur perlu dirumuskan apa tujuan dari program yang telah ditetapkan. Tujuan yang baik memiliki karakteristik jelas dan spesifik

sehingga tercermin bagaimana cara mencapai tujuan tersebut sesuai dengan dana, waktu dan tenaga yang tersedia.

4. Penentuan kelompok sasaran. Kelompok sasaran adalah sejumlah orang yang akan ditingkatkan kualitas hidupnya melalui program yang telah ditetapkan.
5. Identifikasi sumber dan tenaga pelaksana. Sumber adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menunjang program kegiatan, termasuk didalamnya adalah sarana, sumber dana, dan sumber daya manusia.
6. Penentuan strategi dan jadwal kegiatan. Strategi adalah cara atau metoda yang dapat digunakan dalam melaksanakan program kegiatan.
7. Monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memantau proses dan hasil pelaksanaan program. Apakah program dapat dilaksanakan sesuai dengan strategi dan jadwal kegiatan? Apakah program sudah mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan? suatu kegiatan indikator keberhasilan.

2.6. Rencana Pengembangan Masyarakat

Dalam upaya pengembangan suatu kawasan perencanaan masyarakat dan kawasan diperlukan strategi, yaitu strategi peningkatan kualitas fungsional dan kualitas lingkungan serta kualitas visual kawasan perencanaan. Hal tersebut dilakukan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat melalui penataan ruang-ruang ekonomi. Peningkatan perekonomian masyarakat ini dicapai melalui perbaikan kualitas dan penyediaan ruang-ruang usaha. Dengan demikian dalam matarantai ini diperlukan stimulator untuk memompa perkembangan kawasan.

Tujuan pengembangan kawasan perencanaan didasarkan pada prinsip-prinsip pendekatan yang bersifat manusiawi dan berkelanjutan, seperti :

- a. Efisiensi, dilakukan dengan mengoptimalkan pembangunan sosial ekonomi dan fisik diseluruh kawasan dengan mengembangkan kegiatan yang sesuai dengan azas manfaat dan berwawasan lingkungan.
- b. Keterlibatan peran swasta, untuk menopang keterbatasan dana pemerintah dalam pembiayaan pembangunan sehingga efisiensi dan optimalisasi pembangunan sesuai dengan tuntutan kebutuhan. Peran swasta perlu dilibatkan secara aktif untuk mendukung pengembangan kawasan perencanaan dalam penyediaan dana pembangunan.
- c. Pemerataan, yaitu merekomendasikan pengembangan ekonomi yang dapat memberi manfaat besar pada masyarakat luas secara merata. Upaya ini dilakukan dengan jalan memberikan peluang berusaha dan berpartisipasi pada semua lapisan masyarakat untuk berusaha didalam kawasan perencanaan, termasuk di dalamnya upaya penciptaan kondisi lingkungan hidup serta penyediaan fasilitas/utilitas yang memadai.
- d. Kelayakan, koordinasi dalam pelaksanaan (implementasi) perencanaan pembangunan secara konsisten dan konsekuen, terutama berkaitan dengan upaya pelestarian lingkungan, harus mempertimbangkan pula faktor-faktor kontekstual sebagai akibat perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, kelompok kepentingan dan sistem nilai yang dianut.

2.7 Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi

a. Peningkatkan peluang berusaha

Sasaran daripada pengembangan dan pemberdayaan usaha ekonomi kawasan adalah untuk meningkatkan laju pertumbuhan, menciptakan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Pengembangan ekonomi kawasan tidak dapat dilakukan hanya dengan menata kawasan perencanaan kota, namun harus dilihat pada skala yang lebih luas.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan didalam perencanaan pengembangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam kawasan perencanaan, antara lain :

- Peningkatan fasilitas pelayanan didalam kawasan perencanaan yang mendukung pengembangan kegiatan ekonomi yang sudah berkembang didalam kawasan perencanaan.
- Penyediaan ruang untuk pengembangan tata kegiatan yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan penyediaan ruang yang cukup. Dengan demikian kegiatan baru tersebut diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru, yang dapat mendorong peningkatan perekonomian masyarakat dalam kawasan perencanaan. Hal ini dapat berjalan dengan optimal apabila diikuti dengan peningkatan pelaku ekonomi (mitra usaha) dari luar.

- Meningkatkan ruang-ruang ekonomi yang menjadi ruang usaha sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat.
- Meningkatkan kinerja dan kualitas kegiatan-kegiatan sosial ekonomi lokal tersebut melalui penataan ruang yang terpadu serta penyediaan sarana prasarana pendukung yang dibutuhkan.

b. Peningkatan ruang usaha, jenis usaha dan waktu usaha

Pengembangan ruang usaha didalam kawasan perencanaan dilakukan dengan pola intensifikasi ruang. Intensifikasi ruang dilakukan dengan mengoptimalkan ruang-ruang ekonomi yang ada saat ini sehingga dapat dicapai ruang usaha yang lebih besar. Selain itu intensifikasi ruang juga dilakukan dengan memanfaatkan ruang-ruang dengan fungsi yang berbeda pada waktu yang berbeda.

Diversifikasi usaha dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan keanekaragaman kawasan yang saling mendukung, sehingga dapat menarik minat investor/mitra usaha dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat didalam kawasan.

Agar peningkatan jenis usaha ini saling menguntungkan maka dilakukan pengelompokan jenis usaha yang saling mendukung dan memiliki persamaan.

Selain diversifikasi usaha sebagaimana tersebut diatas, didalam kawasan perencanaan juga terdapat jenis kegiatan usaha kecil. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin kelangsungan usaha kecil adalah dengan

cara memberikan bantuan modal usaha, peluang pasar serta pembinaan yang berkesinambungan.

c. Peningkatan modal usaha

Peningkatan modal usaha dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat didalam kawasan perencanaan secara khusus dilakukan meliputi 2 hal yaitu modal ketrampilan dan modal finansial (dengan tetap memperhatikan modal-modal yang sudah tersedia lainnya).

1. Modal keterampilan

Untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat didalam kawasan perencanaan harus dikaitkan dengan visi dan misi pengembangan ruang didalam kawasan perencanaan, sehingga antara sumber daya manusia dan program pengembangan ruang didalam kawasan transmigrasi dapat saling mendukung.

Dalam kaitannya dengan pengembangan ruang kawasan transmigrasi, maka diperlukan peningkatan ketrampilan masyarakat dalam hal mengembangkan potensi hasil pertanian khususnya perikanan yang melimpah didalam kawasan perencanaan yang akan dilakukan pengembangan skala usahanya. Peningkatan ketrampilan ini diutamakan untuk memberikan nilai tambah hasil pertanian dan perikanan menjadi produk-produk baru yang dapat menjadi kekhasan kawasan.

Namun demikian tidak menutup kemungkinan bagi pengembangan ketrampilan-ketrampilan lain bagi pengembangan produk-produk yang

dibutuhkan masyarakat sebagai efek ganda dari pengembangan kawasan perencanaan.

2. Modal finansial

Salah satu kendala dalam pengembangan usaha masyarakat didalam kawasan perencanaan selain ketrampilan adalah modal finansial. Program pemberdayaan masyarakat dapat dijadikan suatu model bantuan modal finansial bagi pengembangan usaha kawasan. Selain dari program pemberdayaan masyarakat, bantuan kredit mikro dari lembaga keuangan (bank) juga diharapkan akan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan taraf hidup masyarakat di kawasan ini.

Dengan demikian maka pemberian pinjaman modal usaha selanjutnya diarahkan pada pengembangan usaha yang masih terkait dengan tema pengembangan kawasan perencanaan sebagai pusat agribisnis khususnya komoditas Karet, serta tidak menutup kemungkinan untuk komoditas-komoditas lainnya dari kawasan ini.

Untuk dapat mencapai hal tersebut maka satu hal yang harus dilakukan adalah melembagakan masyarakat yang didukung oleh pemerintah daerah dalam rangka membuka akses ke lembaga-lembaga keuangan.

Untuk menjamin keberhasilan pengembangan usaha dalam kawasan perencanaan, masyarakat juga harus terlibat dalam pengambilan resiko daripada usaha yang dikembangkan.

Untuk menunjang kegiatan pertanian di wilayah kawasan transmigrasi yang akan diarahkan dengan jenis komoditas unggulan yang ada di daerah masing-

masing perlu juga didukung oleh tenaga pembimbing serta lembaga yang akan mendukung bagi pengembangan komoditas tersebut diantaranya :

- a. Pelatihan mengenai sistem penanganan dalam mengembangkan produksi hasil pertanian.
- b. Secara kelembagaan perlu dukungan penyuluh pertanian lapangan.
- c. Pelatihan mengenai sistem manajemen penanganan pasca panen untuk dapat menghasilkan nilai tambah.
- d. Pelatihan sistem packaging produksi pasca panen. Dengan kelompok sasaran adalah petani dengan tingkat pengetahuan yang rendah.

2.8. Pengembangan Sosial Budaya

Untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan pengembangan Kawasan transmigrasi, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan peran serta masyarakat didalam setiap aktivitas pengembangan kawasan, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan (konstruksi) maupun pasca konstruksi serta adanya kebersamaan pengembangan usaha ekonomi. Untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap pengembangan kawasan, maka perlu dilakukan sosialisasi tentang keuntungan pengembangan kawasan ini bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat termotivasi untuk turut serta dalam proses perencanaan, konstruksi dan pemeliharaan pasca konstruksi serta menjaga keberlangsungan usaha ekonomi.

Dalam kaitannya dengan pengembangan sosial budaya ini, peran aktif masyarakat diharapkan dapat menjadi salah satu kunci sukses bagi upaya pengembangan kawasan transmigrasi.

Sebagaimana diketahui pola pembangunan Top down planning hasilnya kurang dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Disamping itu tingkat kepedulian masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan kurang dan ini berdampak pada perkembangan hasil pembangunan selanjutnya yang mana operasi dan pemeliharaan fasilitas yang dibangun akan menjadi beban pemerintah.

Jika pemerintah tidak dapat mengcover beban ini maka keberadaan fasilitas ini menjadi berkurang manfaatnya bagi masyarakat karena rusak atau sebab lain yang menjadikan fasilitas tidak terpelihara (tidak terjaga keberlanjutannya).

Dengan demikian pola pendekatan bottom up planning akan lebih tepat, karena akan menyentuh langsung kepentingan masyarakat, dan tentunya hal ini akan membutuhkan partisipasi masyarakat secara aktif. Pemberdayaan masyarakat ini pada dasarnya adalah salah satu perangkat pelaksanaan pembangunan sehingga masyarakat dapat turut serta aktif dalam setiap tahap pengembangan kawasan ini.

Pembangunan yang bertumpu pada masyarakat atau yang melibatkan partisipasi masyarakat pada dasarnya merupakan suatu usaha nyata untuk mengajak masyarakat mengerti apa yang akan mereka dapatkan dan pertaruhkan dalam pembangunan.

Pengertian partisipasi yang akan mewarnai seluruh proses pemberdayaan dipandang sebagai upaya pelibatan diri pada suatu keinginan bersama untuk membuat kesepakatan bersama. Pengertian ini hendaknya tidak didasarkan pada pada suatu proses rekayasa sosial dimana yang terjadi bukanlah partisipasi yang sesungguhnya, melainkan persetujuan masyarakat karena ketidaktahuan dan ketidakmengertian masyarakat. Partisipasi yang sebenarnya adalah bila masyarakat dapat berfungsi sebagai sosial kontrol.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, dimana masyarakat sebagai subyek dalam pengembangan komoditas unggulan terpilih (padi dan Karet) di dalam kawasan ini akan mampu menjaga iklim usaha yang dikerjakan. Beberapa upaya yang perlu ditanamkan untuk kelangsungan usaha mereka antara lain ; mereka harus mampu menumbuhkan kepercayaan para pemberi modal.

Dalam proses pemberdayaan masyarakat, harus dirumuskan untuk siapa pembangunan ini ditujukan. Dengan demikian akan terjadi proses kemitraan antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan kawasan. Kemitraan ini berarti pengakuan adanya keberadaan aktor-aktor pembangunan dalam hierarki yang sama pada suatu proses pembangunan dengan menempatkan diri pada posisi tugasnya masing masing. Para aktor tersebut akan diberdayakan dalam proses (learning by doing) sehingga mampu dan dapat mencapai pemerataan. Pemerataan yang dimaksudkan adalah pemerataan untuk mendapatkan pelayanan, pemerataan untuk mendapat kesempatan memproduksi nilai tambah dsb.

Dalam pendekatan ini ketentuan dasar yang dianut adalah :

- a. Masyarakat dalam hal ini adalah anggota masyarakat yang diorganisaikan menjadi suatu kelompok yang bersifat paguyuban (komunitas) yang saling mengenal, terikat oleh kepentingan dan tujuan yang sama, didudukan sebagai pelaku dan penentu program.
- b. Penanganan pola pemberdayaan masyarakat ini harus bersifat intersektoral mencakup tribina (bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan) dimana ketiganya harus dilihat sebagai suatu kesatuan untuk mencapai pembangunan manusia seutuhnya.

Untuk mendukung Pengembangan sosial budaya di Kawasan transmigrasi yang perlu di lakukan adalah :

- Pembinaan serta bantuan pendidikan bagi petani dan keluarganya seperti mengadakan kegiatan Kelompok Belajar Paket A, B dan C.
- Melakukan pembinaan keterampilan bagi keluarga petani dalam menangani pasca panen produksi Karet dan padi.
- Pembinaan dan penyuluhan keluarga berencana untuk menuju keluarga yang sehat dan sejahtera.
- Pelayanan kesehatan bagi keluarga pra sejahtare dan keluarga sejahtera.
- Pembinaan terhadap generasi muda dan peranan wanita dalam mendukung pengembangan Kawasan transmigrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.9. Pengembangan Mental Spiritual

Dalam pengembangan suatu kawasan, mental spiritual para pelaku pembangunan akan menjadi salah satu kunci keberhasilan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan. Upaya pengembangan mental spiritual ini tidak terlepas dari salah satu konsep tribina yaitu 'bina manusia'.

Untuk mencapai hal tersebut beberapa upaya yang sepatutnya dilaksanakan dalam pengembangan mental spriritual para pelaku pembangunan di kawasan ini antara lain :

- a. memberikan bimbingan keagamaan, dalam upaya menanamkan kesadaran moral sesuai dengan tuntunan agama yang dianut, serta meningkatkan mutu moral masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana peribadatan seperti : pembangunan mesjid dan mushola serta penyediaan prasarana pendukungnya antara lain pengadaan buku penunjang ibadah, sound sistem,
- b. memberikan pengertian tentang kepercayaan para pemberi modal mempunyai peran yang sangat besar dalam pengembangan skala usaha ekonomi,
- c. memberikan pengetahuan akan pentingnya keseimbangan ekosistem guna keberlanjutan pengembangan kawasan ini.

2.10 Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Desa

Dalam pengembangan agribisnis perlu dibentuk dan diperkuat suatu bentuk kelembagaan yang mewadahi petani sebagai pelaku bisnis. Kelembagaan petani tersebut dimaksudkan sebagai organisasi legal yang memiliki kemampuan

mengakses modal pasar dan mengefisiensikan proses produksi serta pembinaan dari berbagai instansi terkait. Bentuk kelembagaan usaha ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kelembagaan produksi dalam bentuk kelompok tani dan kelembagaan ekonomi dalam bentuk koperasi.

Suatu bentuk kelembagaan produksi untuk pembinaan usaha haruslah cukup kecil dan efektif untuk menyampaikan pesan seperti pesan introduksi teknologi, manajemen, ataupun untuk kepentingan lainnya. Dalam hal demikian lembaga yang terbentuk haruslah berdasarkan hamparan lahan bukan berdasarkan blok pemukiman (domisili), karena informasi yang disampaikan berkenaan dengan usaha pengembangan lahan.

Dalam pembangunan pertanian mempunyai tiga dimensi yang terkait satu sama lainnya, yaitu dimensi fisik teknis, dimensi ekonomi finansial, dan dimensi kelembagaan manusia. Dimensi kelembagaan manusia ini mencakup pengetahuan dan keterampilan, organisasi dan manajemen, training, kapasitas pelaksanaan, hubungan/relasi sosial, politik, komunikasi, motivasi, partisipasi, pemerintahan lokal, hubungan sektor publik dan swasta, budaya dan sistem nilai, pengalaman historis dan sebagainya. Dimana dimensi kelembagaan manusia memegang peranan yang sangat penting dalam upaya mencapai pembangunan pertanian yang berhasil.

Pengembangan aspek sosial kelembagaan di masyarakat ini mencakup dua aspek yaitu ; *pertama* aspek norma dan prilaku, dan *kedua* aspek organisasi. Aspek norma dan prilaku yang ingin dibangun dari pengembangan kawasan ini antara lain menyangkut etos kerja seperti kerja keras, rasional, disiplin, sistematis,

dan terencana. Dimana para petani / pelaku agribisnis didorong untuk berorientasi pada masa depan, kebiasaan menabung juga akan dipupuk.

Disamping pembentukan kelembagaan masyarakat, Pengembangan kelembagaan dalam penanganan kawasan perencanaan maka perlu dilakukan dengan meningkatkan keterlibatan instansi-instansi yang terkait dengan penanganan kawasan perencanaan sebagaimana dicantumkan didalam indikasi program sesuai dengan tugas pokok instansi baik di tingkat pusat, tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan dan desa.

Peningkatan peran instansi tersebut secara umum dapat dikelompokkan pada pola pola penanganan fisik dan non fisik yang akan mendukung pengembangan kawasan.

Selain itu agar pengembangan kawasan ini dapat berkelanjutan maka perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui 2 hal pokok pokok yaitu :

- a. Pemberdayaan ekonomi masyarakat
- b. Peningkatan peranserta masyarakat dalam tiap tahapan pelaksanaan peremajaan kawasan perencanaan
- c. Pemberdayaan kelembagaan

Pola pembangunan yang bertumpu pada masyarakat pada dasarnya memiliki kerangka kerja yang dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Pengorganisasian masyarakat menjadi suatu komunitas yang terorganisir.

- b. Pengorganisasian sumber daya yang dikuasai oleh berbagai pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah dan swasta serta lembaga lembaga lain yang terkait).
- c. Mempertemukan komunitas tersebut dengan sumber daya yang terorganisir.

Untuk menciptakan kondisi ini maka peranan participatory planning menjadi penting dimana pendapat masyarakatlah yang akan dijabarkan dalam rencana-rencana fisik. Oleh sebab itu, maka pemberdayaan masyarakat harus dilakukan dengan konsep tribina yang didalam prosesnya saling mendukung satu dengan lainnya (bina manusia, bina lingkungan, bina usaha) sehingga dapat dicapai suatu hasil pembangunan yang berkelanjutan .

Berapa hal yang perlu diperhatikan agar pengembangan kawasan ini dapat berkelanjutan maka :

- a. Harus didasarkan pada kebutuhan
- b. Penetapan keadaan awal yang dimiliki dan keadaan akhir yang akan dicapai serta dampak sosial budayanya.
- c. Dampak lingkungan
- d. Kesempatan institusional untuk melaksanakan program pembangunan
- e. Beban OM jangka panjang
- f. Penggunaan teknologi tepat guna.

2.11. Pembinaan Dalam Upaya Memberi Rasa Aman Masyarakat

Pemberian rasa aman masyarakat tidaklan hanya sebatas pada hal-hal yang bersifat kriminalitas saja, yang walaupun demikian hal tersebut harus dapat dijaga

dan dipertahankan guna keamanan lingkungan dan keberlangsungan upaya pengembangan kawasan ini menjadi suatu kawasan Transmigrasi.

Pemberian rasa amanpun perlu diupayakan dalam hal pengembangan usaha ekonomi. Dimana dalam hal ini perlu ditumbuhkan rasa aman terhadap investasi yang telah ditanamkan pada kegiatan budidaya, tataniaga dan sebagainya. Dengan terciptanya rasa aman tersebut akan menjadi faktor penilaian para mitra usaha untuk turut menanamkan modalnya, yang sudah barang tentu akan memberikan dampak yang positif bagi pengembangan kawasan ini.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

3.1 Sejarah Terbentuknya Propinsi Sulawesi Utara

Sulawesi Utara mempunyai latar belakang sejarah yang cukup panjang sebelum daerah yang berada di paling ujung utara Nusantara ini menjadi Daerah Propinsi. Dalam sejarah pemerintahan daerah Sulawesi Utara, seperti halnya daerah lainnya di Indonesia, mengalami beberapa kali perubahan administrasi pemerintahan, seiring dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan bangsa. Pada permulaan kemerdekaan Republik Indonesia, daerah ini berstatus keresidenan yang merupakan bagian dari Propinsi Sulawesi. Propinsi Sulawesi ketika itu beribukota di Makassar dengan Gubernur yaitu DR.G.S.S.J. Ratulangi.

Kemudian sejalan dengan pemekaran administrasi pemerintahan daerah-daerah di Indonesia, maka pada tahun 1960 Propinsi Sulawesi dibagi menjadi dua propinsi administratif yaitu Propinsi Sulawesi Selatan-Tenggara dan Propinsi Sulawesi Utara-Tengah melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 1960. Untuk mengatur dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di Propinsi Sulawesi Utara-Tengah, maka berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor.122/M Tahun 1960 tanggal 31 Maret 1960 ditunjuklah A. Baramuli, SH sebagai Gubernur Sulutteng.

Dalam perkembangan selanjutnya, tercatat suatu momentum penting yang terpatris dengan tinta emas dalam lembar sejarah daerah ini yaitu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tanggal 23 September 1964 yang

menetapkan status Daerah Tingkat I Sulawesi Utara sebagai daerah otonom Tingkat I dengan Ibukotanya Manado. Selanjutnya, seiring dengan nuansa reformasi dan otonomi daerah, maka telah dibentuk Propinsi Gorontalo sebagai pemekaran dari Propinsi Sulawesi Utara melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000. Dengan dibentuknya Propinsi Gorontalo tersebut, maka wilayah Propinsi Sulawesi Utara meliputi; Kota Manado, Kota Bitung, Kab. Minahasa, Kab. Sangihe dan Talaud dan Kab. Bolaang Mongondow. Pada Tahun 2003 Propinsi Sulawesi Utara mengalami penambahan 3 Kabupaten dan 1 Kota dengan Kabupaten Minahasa sebagai Kabupaten induk yaitu Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Tomohon serta Kabupaten Kepulauan Talaud. Kemudian tahun 2007 ketambahan lagi 4 lagi Kabupaten/Kota yakni Kab. Minahasa Tenggara, Kab. Bolmong Utara, Kab. Sitaro dan Kota Kotamobagu.

3.2 Geografis

Propinsi Sulawesi Utara terletak di jazirah utara Pulau Sulawesi dan merupakan salah satu dari tiga propinsi di Indonesia yang terletak di sebelah utara garis khatulistiwa. Dua propinsi lainnya adalah Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Dilihat dari letak geografis Sulawesi Utara terletak pada 0.300-4.300 Lintang Utara (LU) dan 1210-1270 Bujur Timur (BT).

3.3 Demografi

Propinsi Sulawesi Utara terdiri dari 13 Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk masing-masing seperti terlihat pada table dibawah ini:

Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk
Kota Manado	417.787
Kota Bitung	165.624
Kota Tomohon	83.451
Kota Kotamobagu	94.602
Kab. Bolaang Mongondow	301.099
Kab. Bolmong Utara	100.365
Kab. Minahasa Utara	154.189
Kab. Minahasa Tenggara	81.879
Kab. Minahasa Selatan	196.889
Kab. Minahasa	316.391
Kab. Kepulauan Talaud	81.734
Kab. Kepulauan Sangihe	131.908
Kab. Kepulauan SITARO	63.355
J U M L A H	2.189.273

Penyebaran Penduduk di Sulawesi Utara cenderung tidak merata. Terdapat 4 daerah yang mempunyai penduduk dengan persentase diatas 8%, atau sekitar 63,39 % dari penduduk Sulawesi Utara berada didaerah ini yakni: Kabupaten Bolaang Mongondow (13.75%), Kabupaten Minahasa (14.45%), Kabupaten Minahasa Selatan (8,99%), dan Kota Manado (19.08%). Sisa sebaran penduduk dengan persentase dibawah 8 % adalah: Kabupaten Sangihe (6,06%), Minahasa Tenggara (4,58%)` Kabupaten Talaud (3,73%), Kabupaten Minahasa Utara (7,04%), dan Kabupaten Sitaro (2,89%), Kota Bitung (7,57%), Kota Tomohon (3.81%), Kota Kotamobagu (4.32%) .

3.4 Iklim & Curah Hujan

Iklim daerah Sulawesi Utara termasuk tropis yang dipengaruhi oleh angin muson. Pada bulan - bulan Nopember sampai dengan April bertiup angin Barat yang membawa hujan di pantai Utara, sedangkan dalam Bulan Mei sampai Oktober terjadi perubahan angin Selatan yang kering.

Curah hujan tidak merata dengan angka tahunan berkisar antara 2000-3000 mm, dan jumlah hari hujan antara 90-139 hari. Suhu udara berada pada setiap tingkat ketinggian makin ke atas makin sejuk seperti daerah kota Kota Tomohon, Langowan di Minahasa, Modinding di Kabupaten Minahasa Selatan, Kota Kotamobagu, Modayag dan Pasi di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Daerah yang paling banyak menerima curah hujan adalah daerah Minahasa. Suhu udara rata-rata 25°C. Suhu udara maksimum rata-rata tercatat 30°C dan suhu udara minimum rata-rata 22,1 °C. Kelembaban udara tercatat 73,4 %. Kendati demikian suhu atau temperatur dipengaruhi pula oleh ketinggian tempat di atas permukaan laut. Semakin tinggi letaknya, maka semakin rendah pula suhunya, dengan perhitungan setiap kenaikan 100 meter dapat menurunkan suhu sekitar 0,6 °C.

3.5 Flora dan Fauna

Pada umumnya varitas flora dan fauna di Sulawesi Utara sama dengan keadaan wilayah-wilayah lainnya di Indonesia, kecuali beberapa jenis hewan yang tidak terdapat di daerah lain seperti Babi Rusa, Burung Maleo, Burung Taong, Kera Mini (*Tarsius Spectrum*) di Cagar Alam Kota Bitung dan Ikan Purba Raja Laut (*Coelacant*) dilepas Pantai Manado. Daerah ini tidak terdapat binatang buas kecuali

jenis ular dan buaya yang jumlahnya tidak banyak.

Wilayah perairan laut Sulawesi Utara terdapat beberapa jenis ikan, karang laut, plankton dan lumutan. Disamping itu mulai aktif dibudidayakan rumput laut dan kerang mutiara. Beberapa jenis ikan laut yang terkenal dan merupakan salah satu sumber devisa antara lain: ikan tuna, cakalang, ekor kuning, udang laut, dan lain-lainnya. Keadaan flora dapat dikatakan bahwa daratan Sulawesi Utara sebagian didominasi oleh hutan. Kelebatan hutan rimba mulai dari ketinggian 300 meter dari permukaan laut sampai pada puncak-puncak gunung dengan berbagai jenis kayu yang berkualitas baik, antara lain eboni (kayu hitam) kayu besi, kayu linggua, kayu cempaka, kayu nantu, kayu gopasa, kayu meranti, terdapat juga rotan, dan berbagai jenis Dammar. Disamping itu, banyak terdapat tanaman keras perkebunan antara lain kelapa, pala, dan cengkeh.



3.6 Suku Bangsa, Bahasa dan Agama



Penduduk Sulawesi Utara terdiri dari 3 (tiga) kelompok etnis utama, yaitu:

- *Suku Minahasa;*
- *Suku Sangihe dan Talaud;*
- *Suku Bolaang Mongondow.*

Masing-masing kelompok etnis tersebut terbagi pula dalam sub etnis yang memiliki bahasa, tradisi dan norma-norma kemasyarakatan yang khas serta diperkuat semangat *Mapalus, Mapaluse dan Moposad.*

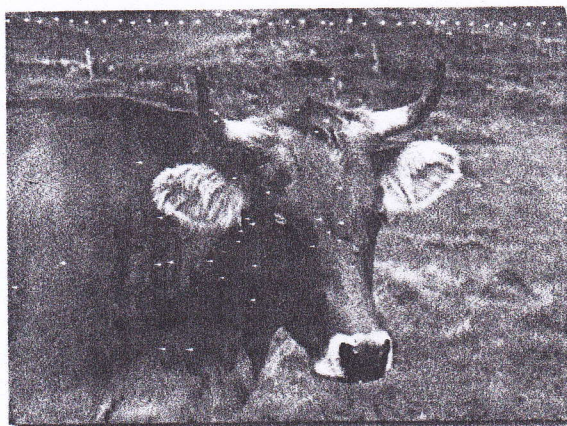
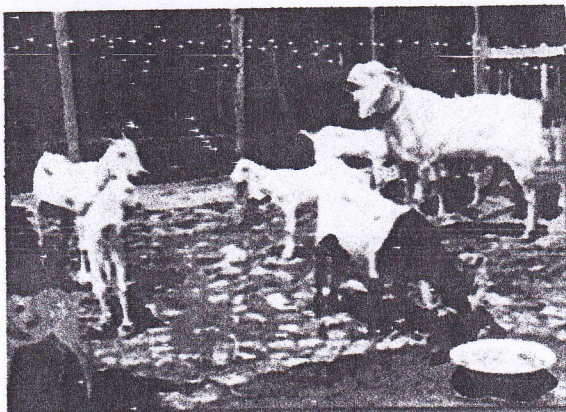
Dengan demikian, bahasa yang ada di Sulawesi Utara dibagi ke dalam:

- Bahasa Minahasa (*Toulour, Tombulu, Tonsea, Tontemboan, Tonsawang, Ponosakan dan Bantik*).
- Bahasa Sangihe Talaud (*Sangie Besar, Siau, Talaud*).
- Bahasa Bolaang Mongondow (*Mongondow, Bolaang, Bintauna, Kaidipang*).

Namun demikian Bahasa Indonesia adalah Bahasa Nasional yang digunakan dan dimengerti dengan baik oleh sebagian besar penduduk Sulawesi Utara.

Agama yang dianut oleh penduduk di Propinsi Sulawesi Utara adalah **Protestan, Katolik, Islam, Hindu dan Budha.**

Peternakan



Jenis ternak utama yang dipelihara oleh masyarakat Sulawesi Utara adalah sapi, babi, kambing, ayam, itik, dan kuda, sekaligus merupakan jenis ternak yang paling banyak dijumpai. Tujuan utama pemeliharaan ternak umumnya untuk memperoleh produksi daging dan telur walaupun sementara ini hanya untuk mencukupi kebutuhan lokal. Kecuali sapi, selain dibutuhkan dagingnya sebagai protein hewani juga berfungsi sebagai pengganti mesin ataupun manusia dibidang ketenagakerjaan sektor pertanian, transportasi dan pariwisata. Ternak kuda selain fungsi utamanya sebagai alat/binatang penarik kendaraan tradisional bendi, pedati dan gerobak, juga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam olahraga pacuan kuda yang

sangat digemari masyarakat Sulawesi Utara.

Peternakan babi pada umumnya dipelihara masyarakat Minahasa, sementara ternak Kambing umumnya dipelihara oleh masyarakat di daerah Bolaang Mongondow. Ternak

unggas berupa itik, dan burung puyuh hampir merata keberadaannya di daerah ini, terutama ayam kampung dan itik, sedangkan produksinya berupa daging dan telur merupakan konsumsi rumah tangga disamping sebagai pendapatan tambahan. Peternakan ayam secara profesional telah berkembang yang diusahakan oleh perusahaan ataupun perorangan.

Perikanan



Perikanan laut Sulawesi Utara mempunyai potensi yang cukup tinggi terutama pada beberapa jenis ikan dan hasil laut lainnya yang dapat dikelola secara ekonomis untuk kebutuhan lokal maupun ekspor. Penangkapan ikan di laut telah

mengarah pada penggunaan motorisasi walaupun sebagian besar nelayan masih menggunakan cara tradisional. Jenis ikan yang terdapat di perairan Sulawesi Utara adalah ikan Tuna, Cakalang, Tongkol, Lolosi, Ekor Kuning, sedangkan ikan yang berkulit keras seperti Udang, Kepiting, Rajangan, dan berkulit lunak terdiri dari Cumi-Cumi, Kepiting, Penyu, dan Teripang Laut.

Hasil laut lainnya yang perkembangannya mempunyai masa depan yang cerah adalah Rumput Laut, Mutiara Laut dan Biota Laut lainnya yang pengusahaannya telah dibudidayakan secara profesional. Unit-unit penangkapan ikan yang ada di Sulawesi Utara selain Kota Bitung juga terdapat pusat-pusat penangkapan lainnya seperti; Dagho di Sangihe Talaud, Labuan Uki dan Kotabunan Molibagu di Kabupaten Bolaang Mongondow. Pemeliharaan ikan di darat terdapat di kolam, empang, tambak, dan sawah sedangkan penangkapan ikan dilakukan di sungai, kali dan danau. Jenis-jenis ikan tawar yang ada dan terdapat di Sulawesi Utara adalah ikan mas, mujair, nila, payangka, udang

dan jenis lainnya.

Kehutanan

Luas Kawasan Hutan di Propinsi Sulawesi Utara saat ini berkisar 1.877.220 Ha. Menurut Tata Guna Hutan, Propinsi Sulawesi Utara terbagi atas fungsi sebagai Hutan Lindung, hutan Suaka Alam/Wisata, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi dan Hutan Bakau. Jenis kayu bervariasi dari kayu kelas satu sampai kelas empat. Adapun jenis kayu dimaksud adalah kayu besi, meranti, linggua, cempaka, nantu, gopasa, agatis dan kayu lokal lainnya. Disamping itu juga terdapat hasil hutan ikutan yang mempunyai nilai ekonomi dan nilai tambah seperti rotan, damar, kayu manis, ijuk, daun woka dan lainnya.

Pertambangan

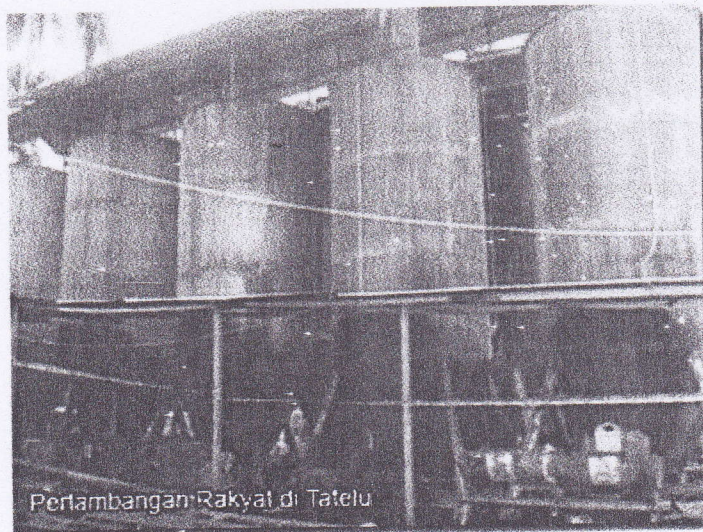
Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan, menunjukkan bahwa banyak terdapat singkapan-singkapan bahan galian yang berharga dengan deposit yang cukup besar antara lain:

Tembaga terdapat di Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Minahasa, dan Kab. Sangihe Talaud; Emas dan Perak terdapat di Kab. Sangihe Talaud, Kab. Minahasa, Kab. Minahasa Utara, Kab. Minahasa Selatan dan Kab. Bolaang Mongondow; Nikel dan Titanium terdapat di Kab. Sangihe Talaud; Besi terdapat di Kab. Minahasa. Mangan terdapat di Kab. Minahasa; Bahan Baku Semen terdapat di Kab. Bolaang Mongondow; Pasir Besi/ Hitam terdapat di Kab. Sangihe Talaud, Minahasa dan Gorontalo; Belerang terdapat di Kab. Minahasa dan Kab.

Bolaang

Mongondow.

Bahan galian lain yang juga banyak diolah adalah Kaolin yang terdapat di Toraget Minahasa. Sedangkan bahan galian C seperti pasir, batu, krikil, trass dan lainnya hampir merata keberadaannya di seluruh Sulawesi Utara. Bahan tambang yang saat ini cukup memberikan kontribusi kepada daerah adalah tambang emas yang dikelola oleh perusahaan dan perorangan.



3.8 Kependudukan

Jumlah Penduduk	Laki	Perempuan
2196700	1123300	1073400

Pertumbuhan & Kepadatan

Pertumbuhan	Kepadatan
1.12	142.86

Angkatan Kerja

Usia Kerja	Angkatan Kerja	Mencari Pekerjaan	TPAK	TPT
1654863	1086281	141646	65.64	13.04

Gini Ratio	TFR	IMR	Morbiditas	Persentase Kemiskinan
0.27	1.91	16.00	29.26	12.96

Indeks Pembangunan Manusia

IPM	Angka Harapan Hidup	Angka Melek Huruf	Angka Lama Sekolah
	71.70	99.90	9.38

Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup	Laki	Perempuan

71.70		
-------	--	--

Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf			Laki	Perempuan
99.90				
IPJ	IDJ	IKM		

Keterangan :

TPAK : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka

IMR : Infant Mortality Rate

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

IPJ : Indeks Pembangunan Jender

IDJ : Indeks Pemberdayaan Jender

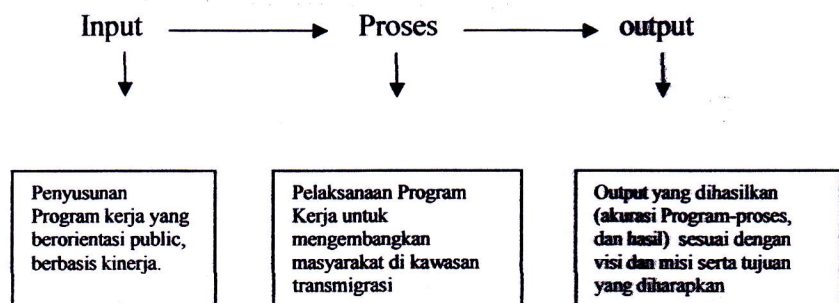
IKM : Indeks Kemiskinan Manusia

BAB IV

PENDEKATAN DAN METODOLOGI

4.1. Pendekatan Input Output

Dengan Penekanan pada output, setiap perencanaan program diarahkan untuk menentukan tingkat output yang akan dihasilkan dalam setiap periode waktu satu atau lima tahun. Dengan adanya penekanan pada output kerja, parameter kinerja dapat terukur, sehingga arah dan tujuan pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi mencapai sasaran yang diinginkan. Sehingga penyusunan program Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi sesuai dengan apa yang akan dihasilkan, dan dalam pelaksanaannya berpegang pada moral, etika, dan nilai-nilai menuju tujuan visi dan misi Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi.



Pendekatan Perancangan

Pembangunan sosial budaya (*social-culture development*) merupakan strategi dalam paradigma pembangunan yang bertumpu pada rakyat (*people centered development*). Strategi ini menyadari pentingnya kapasitas masyarakat

untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal melalui kesanggupan untuk melakukan pengawasan internal atas sumberdaya material dan non-material.

Landasan utama dari konsepsi pembangunan sosial budaya memusatkan perhatian pada kenyataan bahwa manusia atau sekelompok manusia dapat mengalami kendala dan hambatan dalam proses dan gerak aktualisasi eksistensinya. Pendekatan (*approach*) pembangunan sosial budaya adalah berusaha menciptakan kondisi yang memberikan kemungkinan bagi setiap manusia untuk dapat menunaikan tugas aktualisasi eksistensi seoptimal mungkin. Oleh karena itu gerakan pembangunan tersebut seharusnya memperhatikan aspek-aspek yang menjadi penghambat bagi masyarakat dalam mengaktualisasikan eksistensinya.

Salah satu pendekatan pembangunan sosial budaya adalah model pembangunan lokal (*locality development*), yaitu suatu pendekatan yang mensyaratkan bahwa perubahan dalam masyarakat dapat dilakukan secara optimal bila melibatkan partisipasi aktif yang luas di semua spektrum masyarakat tingkat lokal, baik dalam tahap penentuan tujuan maupun pelaksanaan tindakan perubahan. Pembangunan masyarakat adalah proses yang dirancang untuk menciptakan kondisi sosial-ekonomi yang maju dan sehat bagi seluruh masyarakat melalui partisipasi aktif mereka, serta berdasarkan kepercayaan yang penuh terhadap prakarsa mereka sendiri.

Pembangunan di tingkat lokal bersumber pada satu pandangan bahwa perubahan-perubahan masyarakat dapat dicapai secara optimal bila ditempuh melalui partisipasi aktif yang luas dari seluruh masyarakat tingkat paling bawah

(*grassroot*) dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan-tindakan. Tujuan yang ingin dicapai tidak hanya tujuan akhir, tetapi juga proses untuk mencapai tujuan akhir tersebut sehingga tujuan utamanya, yakni mengembangkan kemampuan masyarakat dapat berfungsi secara *integrative*.

Struktur dan kondisi permasalahan yang selalu dihadapi masyarakat ialah kurang aktifnya partisipasi warga masyarakat. Biasanya, masyarakat diikat oleh tradisi-tradisi yang sifatnya tertutup dari pengaruh luar dan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin masyarakat yang kurang berkehendak mengadakan perubahan atau tidak responsif terhadap perubahan yang datang dari luar. Secara umum, masyarakat pedesaan terdiri atas penduduk yang tingkat pendidikannya relatif rendah dan kurang memiliki pemahaman terhadap permasalahan yang mereka hadapi, juga kurang memiliki kemampuan dan kemauan untuk memecahkan permasalahan yang melingkupi kehidupannya. Strategi dasar yang digunakan untuk memecahkan permasalahan ini adalah usaha penciptaan dan pengembangan partisipasi yang lebih luas dari seluruh warga masyarakat. Usaha-usaha tersebut dimaksudkan untuk menciptakan semangat agar masyarakat terlibat aktif dalam kegiatan, baik dalam penetapan kebijakan, perumusan kebutuhan, maupun pemecahan permasalahan mereka sendiri. Jadi strateginya adalah mencari cara untuk dapat memotivasi masyarakat agar terlibat aktif dalam proses pembangunan. Tema-tema pokok dalam *locality development model* mencakup penggunaan prosedur demokrasi dan kerja sama atas dasar kesukarelaan, keswadayaan, pengembangan kepemimpinan setempat, dan tujuan bersifat pendidikan.

Pembangunan sosial budaya pada hakekatnya adalah *community base development* atau pembangunan masyarakat dari bawah (*bottom-up*), konsepsi dari pembangunan sosial budaya adalah proses yang dirancang untuk menciptakan kondisi sosial-budaya yang lebih maju dan sehat bagi seluruh masyarakat melalui partisipasi aktif mereka, serta berdasarkan kepercayaan yang penuh terhadap prakarsa mereka sendiri. Secara umum konsepsi pembangunan berbasis sosial budaya adalah pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan keterlibatan secara aktif dan langsung oleh masyarakat setempat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan, yang pada akhirnya menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam pemanfaatan dan menjaga kesinambungan (*sustainable*) terhadap program pembangunan di wilayahnya.

4.2. Metodologi

a. Populasi dan Sampel

Populasi Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi adalah seluruh UPT yang ada dan desa sekitar atau desa awal yang ada kawasan sebagai unit analisis.

Sampel diambil dari masing-masing UPT sebanyak 20 orang. Pengambilan sampel dilakukan secara acak, sehingga semua populasi memiliki peluang untuk terpilih menjadi sampel.

a. Kajian Literatur

sebelum kegiatan Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi dilakukan, terlebih dahulu dilakukan kajian literatur

dan membedah atas Peraturan Pemerintah dan teori-teori yang mendasari Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi. Hal ini dimaksudkan sebagai bahan dan dasar bagi tenaga ahli dalam merumuskan disain studi dan ke kunjungan lapangan.

b. Pembuatan Instrumen Kajian

Pembuatan instrumen (kuesioner) dilakukan setelah kajian literatur selesai dilakukan. Hal ini dimaksudkan supaya kajian teori yang diperoleh selama kajian literatur dapat dikembangkan dalam instrumen kajian. Secara rinci pembuatan kuesioner secara rinci akan dijelaskan pada bagian metode.

c. Pengumpulan Data

Pengumpulan data kegiatan Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun data yang dikumpulkan dalam Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi adalah Data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Pengamatan lapangan, wawancara FGD, dan penyebaran kuesioner.

b. Data Sekunder

- Peraturan perundang-undangan
- Renstra dan Renstrada Proponsi dan Kabupaten
- Kebijakan-kebijakan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Data dan informasi perkembangan ekonomi daerah termasuk PAD.

- Data dan informasi kuantitatif mengenai jumlah penduduk dan keagamaan .
- Data dan informasi tentang potensi daerah.
- Data dan informasi tentang sosial budaya.
- Data dan informasi tentang kelembangaan masyarakat dan kelembagaan pemerintah.
- Data dan informasi tentang keamanan daerah.
- Data dan informasi tentang sarana dan prasarana.
- Data dan informasi Tentang perkembangan pendidikan dan kesehatan masyarakat setempat.

d. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu, diskusi/FGD dengan Stake Holder, wawancara mendalam, Metode Content Analysis, Penyebaran Kuesioner, pengamatan langsung dan riset pustaka.

1. FGD (Focus Group Discussion)

Fokus group Discussion digunakan sebagai salah satu metode dalam pengumpulan data. Ciri-ciri dari focus group Discussion adalah secara eksplisit berguna untuk menghasilkan data dan pengetahuan yang tidak diperoleh tanpa interaksi dalam sebuah kelompok.

Focus group Discussion digunakan sebagai sebuah metode yang dikombinasikan dengan metode lain, seperti survey dan wawancara tunggal, dll.

Menurut Morgan dalam Uwe Flick (1998 : 122) menjelaskan bahwa *focus group Discussion* berguna untuk 1) orientasi diri untuk sebuah bidang baru, 2) menghasilkan hipotesis berdasarkan informasi dari responden-responden yang memiliki wawasan, 3) perbedaan evaluasi dari sisi penelitian atau responden penelitian, 4) Pengembangan jadwal-jadwal interview dan Kuesioner-kuesioner, dan 5) mendapatkan interpretasi-interpretasi partisipan dari hasil penelitian sebelumnya.

FGD dengan stake holder dilakukan di masing-masing UPT, setiap FGD peserta antara 7-8 orang stake holder yang dikumpulkan dalam satu ruangan. Cara melakukan FGD, pertanyaan yang sama diajukan kepada semua peserta dan masing-masing peserta memberikan jawaban sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan serta sudut pandangnya masing-masing.

2. Metode Wawancara

Wawancara atau interview merupakan metode penyelidikan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada Pelaku usaha, IKM, stake holder, pemerintah daerah. Keuntungan menggunakan metode interview, yaitu 1) hal-hal yang kurang jelas dapat diperjelas, sehingga orang dapat mengerti apa yang dimaksudkan, 2) penginterview dapat menyesuaikan dengan keadaan yang diinterview, dan 3) terjadinya hubungan yang langsung antara yang interview dengan yang diinterview, sehingga diharapkan dapat menimbulkan suasana hubungan yang baik, dan mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan dan relevan sesuai dengan

maksud penyelidikan. Wawancara dilakukan dengan stake holder, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengusaha setempat, pengurus RW, RT, guru, pengurus KUD, pengurus kelompok tani, kelompok karangtaruna, dan masyarakat umum serta Dinas Transmigrasi dan Dinas terkait lainnya.

3. Metode Kuesioner

Dengan angket orang akan dapat memperoleh fakta ataupun opini. Pertanyaan dalam angket bergantung pada maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Kuesioner dalam kajian ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pertama adalah data identitas pribadi responden dan bagian kedua adalah substansi yang merupakan inti pertanyaan kuesioner yang dikembangkan dari permasalahan dan teori hasil kajian. Pertanyaan dalam kuesioner berupa pertanyaan tertutup, sehingga responden dapat memberikan jawaban dengan mudah.

Kuesioner atau sering juga disebut angket merupakan metode dengan menggunakan daftar pertanyaan yang harus di jawab atau dikerjakan oleh subjek atau responden.

Penyebaran kuesioner langsung kepada stake holder, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengusaha setempat, pengurus RW, RT, guru, pengurus KUD, pengurus kelompok tani, kelompok karang taruna, dan masyarakat umum yang setiap UPT diambil sampel 20 orang. Hal dilakukan dengan asumsi bahwa karakteristik sampel adalah homogen.

4. Metode Content Analysis

Data-data yang dikumpulkan dari laporan tahunan dinas Transmigrasi, Laporan tahunan NakerTrans, perundang-undangan yang berkaitan dengan Transmigrasi, data-data program kerja. Di samping itu, kebijakan-kebijakan dan Kepmen serta kliping-kliping Koran dan majalah yang memuat berita-berita yang masih relevan dengan kajian ini.

5 Pengamatan Langsung

Pengamatan langsung dilakukan terhadap struktur fisik, kelas-kelas sosial, interaksi sosial, perbedaan budaya, perilaku sosial, simbol-simbol budaya baik dilakukan terhadap individu maupun secara berkelompok. Hasil pengamatan tersebut dicatat kemudian dianalisis.

6. Riset Pustaka

Riset pustaka dilakukan untuk menggali teori-teori, pendapat para pakar, laporan penelitian dan kajian-kajian, mengenai perkembangan sosial budaya, politik, kondisi lingkungan, statistik daerah dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kebutuhan penyusunan konsep penelitian dan pembahasan.

Pada dasarnya kegiatan studi kepustakaan adalah mengumpulkan data sekunder dengan cara menyerapkan dan atau mengutip isi sejumlah buku, dokumen, makalah, diktat serta referensi yang dianggap perlu untuk memperoleh data dan atau teori pendukung. Pengumpulan data sekunder dilakukan sebelum penyusunan kuesioner karena hal ini dimaksudkan untuk menggali teori dan konsep untuk pengembangan kuesioner berdasarkan indikator variabel.

e. Analisis Data

Analisis data dimaksudkan untuk menjelaskan data-data yang ditemui di lapangan, sehingga data tersebut menjadi sumber informatif dan dapat dipahami oleh pembacanya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama analisis sebagai berikut:

1. Verifikasi data
2. Tabulasi data
3. Mengkaji Peraturan Pemerintah dan kebijakan lainnya dalam perencanaan dan pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan. Yang diformulasikan dalam bentuk matriks.
4. Mengkaji hasil temuan lapangan
5. Analisis Kependudukan
6. Analisis potensi lahan
7. Analisis potensi ekonomi
8. Analisis potensi sosial budaya
9. Analisis Potensi SDM
10. Analisis sarana dan pasarana
11. Analisis kelembagaan

Kegiatan analisis dilakukan dengan Metode SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) dipakai untuk menganalisis data, walaupun sebagian beranggapan bahwa metode SWOT sudah usang karena masih banyak metode-metode lain yang dapat dipakai untuk analisis data. Namun dalam konteks Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi,

metode SWOT dipandang relevan untuk melihat peluang dan tantangan IKM Sandang ke depan.

Metode SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) adalah suatu metode yang akan digunakan untuk mengungkap Keunggulan, Kelemahan, Peluang dan Hambatan/Tantangan pembangunan dan pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi ke depan. Dengan menggunakan metode ini akan dapat dilihat secara detail sebagai berikut:

- a. Keunggulan pembangunan dan pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi dari aspek potensi daerah dan sosial budaya.
- b. Kelemahan pembangunan dan pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi
- c. Peluang yang dapat dikembangkan oleh Masyarakat di Kawasan Transmigrasi
- d. Hambatan/Tantangan pembangunan dan pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi ke depan

Format yang digunakan untuk memformulasikan metode SWOT serta strategi yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.

Diagram Matriks SWOT Kompensasi Sosial Pada Penerima

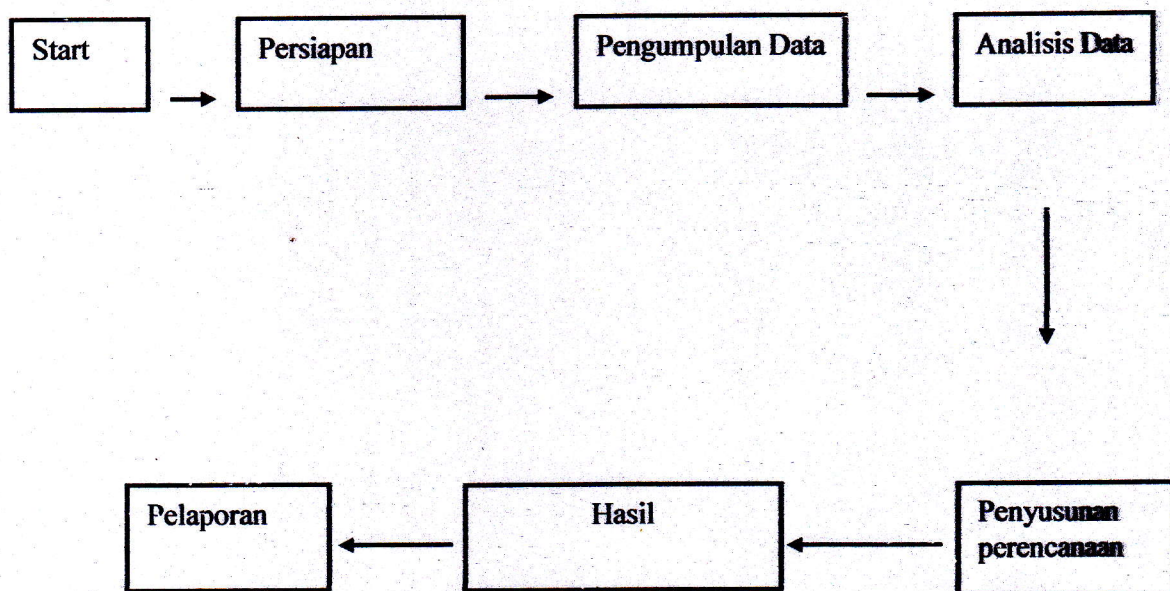
EFAS	IFAS	Strength	Weakness
	Opportunity	Strategi SO Ciptakan strategi dengan menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi WO Ciptakan strategi yg meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
	Threat	Strategi ST Ciptakan strategi dengan menggunakan kekuatan	Strategi WT Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan
		untuk mengatasi ancaman	dan menghindari ancaman

Ket: - IFAS (Internal Strategic Factor Analysis Summary)

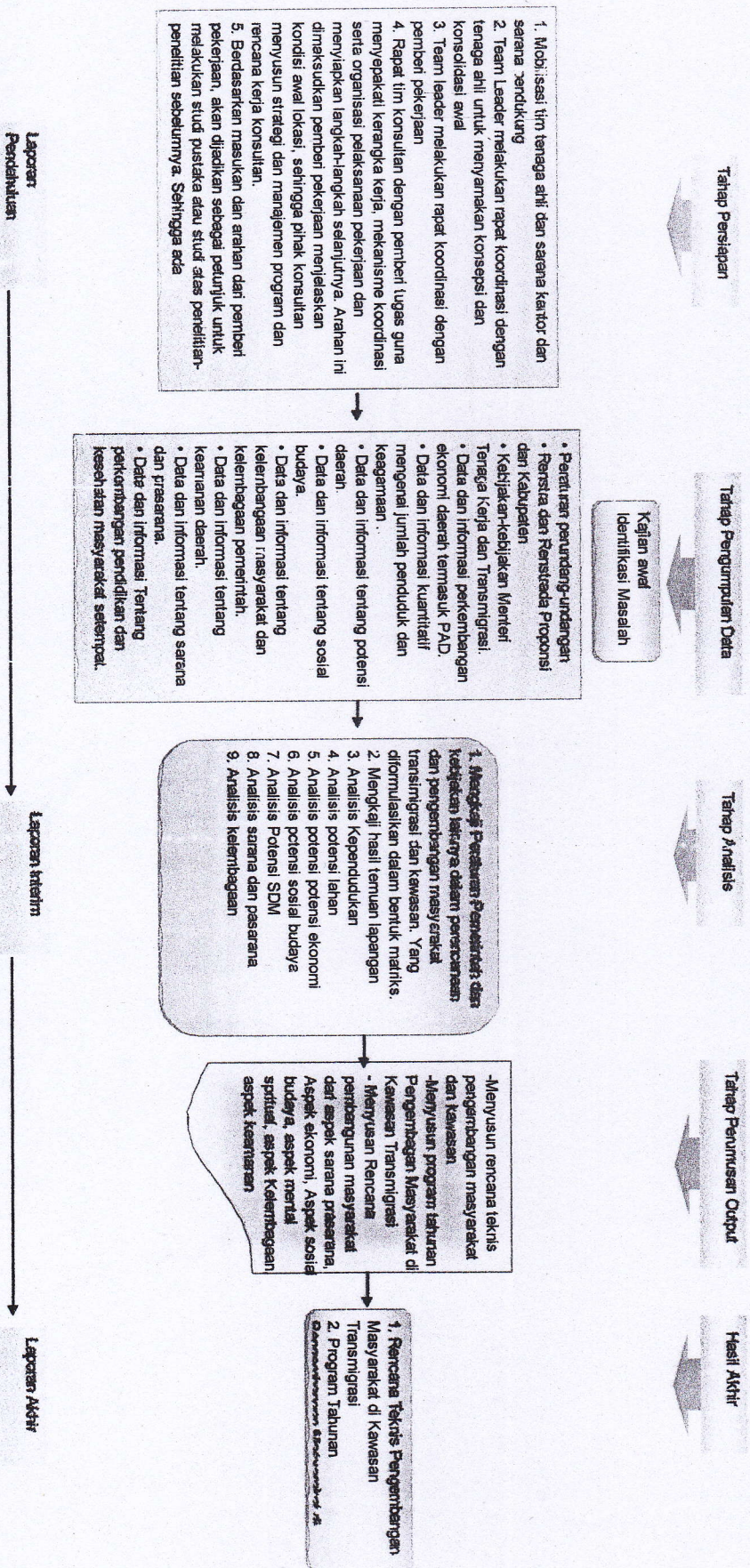
- EFAS (External Strategic Factor Analysis Summary)

Dengan menggunakan metode SWOT, maka selanjutnya akan dapat dirumuskan hasil yang diharapkan yaitu:

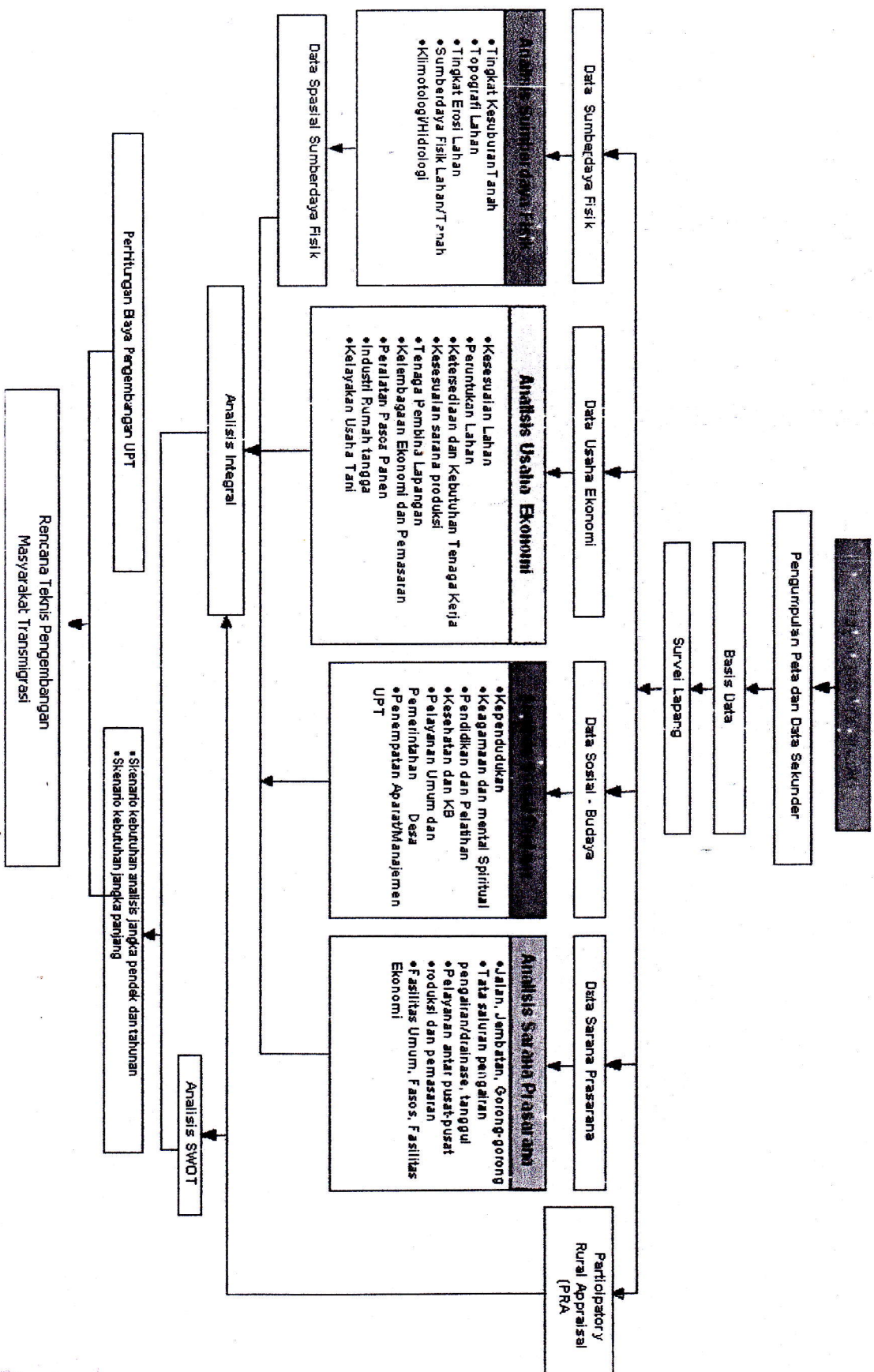
- a. Prediksi pembangunan dan pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi kedepan.
- b. Rencana tindak (rencana implementasi) pembangunan dan pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi

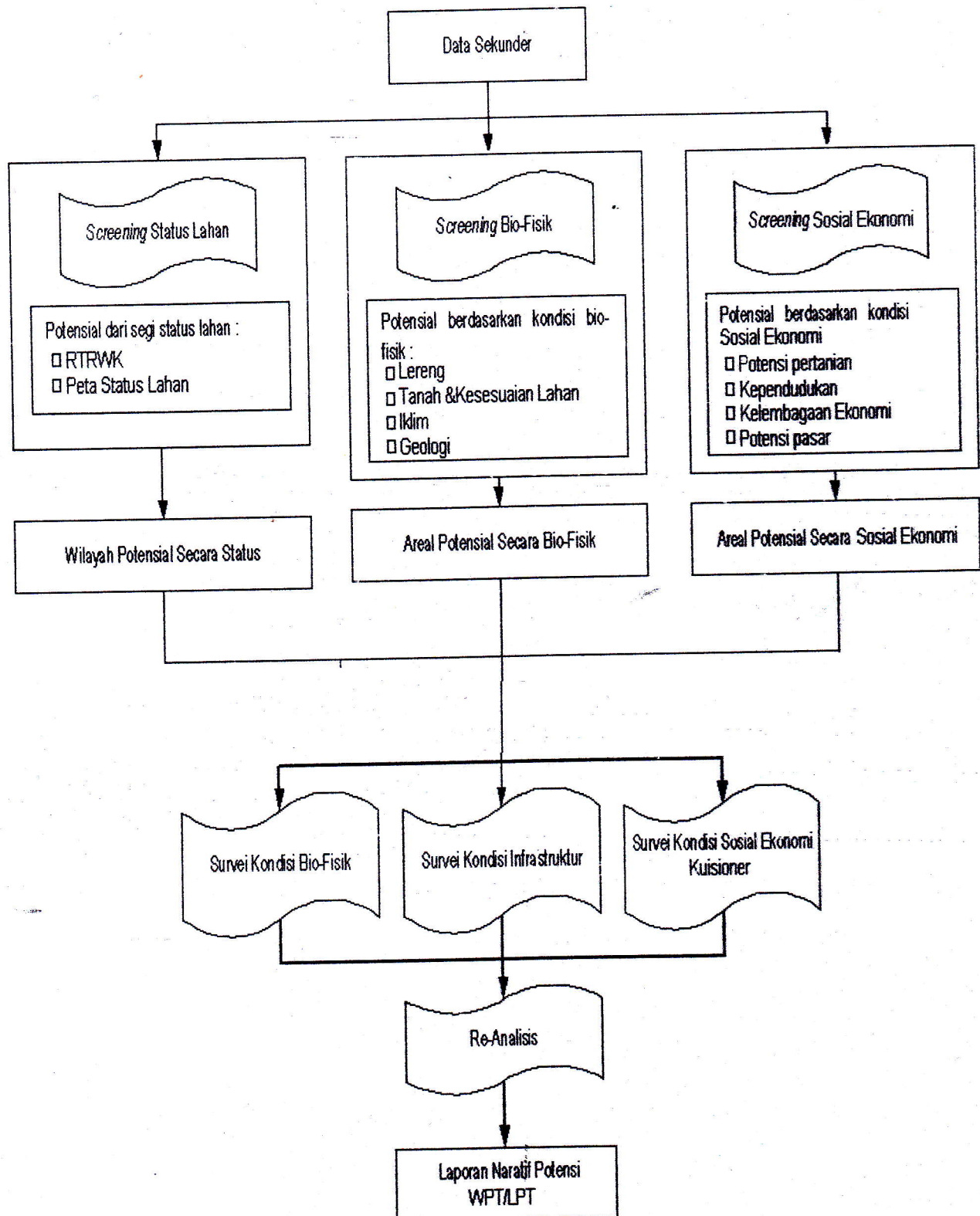
Bagan 4.1.**Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan****Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi**

Bagan 4.2. Alur Pikir Pekerjaan Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi



ALUR METODOLOGI





BAB V

RENCANA KERJA

Rencana kerja pekerjaan Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi ada beberapa tahapan. Adapun tahap-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

5.1. Persiapan

Pada tahap persiapan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Mobilisasi tim tenaga ahli dan sarana kantor dan sarana pendukung.
2. Team Leader melakukan rapat koordinasi dengan tenaga ahli untuk menyamakan konsepsi dan konsolidasi awal.
3. Team leader melakukan rapat koordinasi dengan pemberi pekerjaan.
4. Rapat tim konsultan dengan pemberi tugas guna menyepakati kerangka kerja, mekanisme koordinasi serta organisasi pelaksanaan pekerjaan dan menyiapkan langkah-langkah selanjutnya. Arahan ini dimaksudkan pemberi pekerjaan menjelaskan kondisi awal lokasi, sehingga pihak konsultan menyusun strategi dan manajemen program dan rencana kerja konsultan.
5. Berdasarkan masukan dan arahan dari pemberi pekerjaan, akan dijadikan sebagai petunjuk untuk melakukan studi pustaka atau studi atas penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga ada kesinambungan konsep dengan pekerjaan ini.
6. Penyusunan disain studi dan rincian jadwal pelaksanaan dilapangan.

7. Penyusunan laporan pendahuluan.
8. Penyampaian laporan pendahuluan kepada pemberi pekerjaan.
9. Diskusi laporan pendahuluan dengan pemberi pekerjaan.
10. Merevisi laporan pendahuluan berdasarkan masukan-masukan yang diperoleh dalam diskusi/presentasi laporan.

5.2 Tahap Pelaksanaan Kajian

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap pengumpulan data sebagai berikut:

Pelaksanaan kegiatan Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi. Dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pengumpulan data primer dan data sekunder dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Data sekunder dari instansi terkait
 - Peraturan perundang-undangan
 - Renstra dan Renstrada Proponsi dan Kabupaten
 - Kebijakan-kebijakan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - Data dan informasi perkembangan ekonomi daerah termasuk PAD.
 - Data dan informasi kuantitatif mengenai jumlah penduduk dan keagamaan .
 - Data dan informasi tentang potensi daerah.
 - Data dan informasi tentang sosial budaya.
 - Data dan informasi tentang kelembagaan masyarakat dan kelembagaan pemerintah.

- Data dan informasi tentang keamanan daerah.
- Data dan informasi tentang sarana dan prasarana.
- Data dan informasi Tentang perkembangan pendidikan dan kesehatan masyarakat setempat.

b. Data Primer

Data yang dikumpulkan melalui Pengamatan lapangan, wawancara FGD, dan penyebaran kuesioner di masing-masing lokasi studi. Sumber data primer, Guru, Tokoh masyarakat, RT/RW, Camat, Bupati, Ketua Karang Taruna, dan Ketua Kelompok Tani.

2. Penyusunan laporan antara yang merupakan informasi kemajuan Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi dan informasi hasil survey lapangan.
3. Presentasi laporan antara untuk mendapatkan masukan-masukan dan arahan-arahan dari tim teknis dan Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan.
4. Revisi Laporan antara.
5. Penyerahan Laporan antara.

5.3 Tahap Analisis

Pertama kali yang dilakukan dalam tahap analisis adalah verifikasi data dan tabulasi data. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahap analisis sebagai berikut:

1. Mengkaji Peraturan Pemerintah dan kebijakan lainnya dalam perencanaan dan pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan. Yang diformulasikan dalam bentuk matriks.
2. Mengkaji hasil temuan lapangan
3. Analisis Kependudukan
4. Analisis potensi lahan
5. Analisis potensi ekonomi
6. Analisis potensi sosial budaya
7. Analisis Potensi SDM
8. Analisis sarana dan prasarana
9. Analisis kelembagaan

5.4 Tahap Perumusan Hasil

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama tahap perumusan hasil sebagai berikut:

1. Menyusun rencana teknis pengembangan masyarakat dan kawasan.
2. Menyusun program tahunan Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi.
3. Menyusun Rencana pembangunan masyarakat dari aspek sarana prasarana, Aspek ekonomi, Aspek sosial budaya, aspek mental spritual, aspek Kelembagaan, aspek keamanan.

5.5 Tahap Pelaporan

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan dalam pelaporan sebagai berikut:

1. Penyusunan draft laporan akhir
2. Konsultasi draft laporan akhir ke tim teknis
3. Presentasi draft laporan akhir
4. Revisi draft menjadi laporan akhir sesuai hasil masukan dan saran-saran oleh peserta yang hadir dalam presentasi.
5. Penyerahan laporan akhir
6. Berita acara serah terima pekerjaan antara pihak konsultan dengan pemberi pekerjaan.

BAB VI

PELAKSANAAN PENELITIAN

6.1. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Supaya setiap tahapan kegiatan dapat dilaksanakan dan dikontrol, maka perlu untuk dilakukan penyusunan jadwal pelaksanaan pekerjaan Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi. Di samping itu, untuk keperluan pembagian *job* masing-masing tenaga ahli, sehingga masing-masing tenaga ahli dapat bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Adapun rincian jadwal pelaksanaan secara rinci dapat dilihat pada tabel 6.1. jadwal pelaksanaan pekerjaan di bawah ini.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BAB VII

RENCANA PELAKSANAAN SURVEY

7.1 Persiapan Survey dan Kajian Lapangan

Survey dan Kajian Lapangan pada dasarnya adalah kegiatan lanjutan setelah telaah dan studi pustaka dilakukan. Data dan informasi akan menjadi lebih lengkap dan bermakna dengan di lengkapinya data dan fakta yang akan diperoleh selama survey dan kajian lapangan. Beberapa tahapan yang dilakukan sebelum survey/kajian lapangan adalah:

- Pengorganisasian Tim berikut berbagi peran tanggungjawab dalam koordinasi keanggotaan Tim
- Pemahaman Materi Pekerjaan, dan pengumpulan data sekunder yang mendukung,
- Pemahaman lokasi / lapangan yang akan menjadi tanggungjawab masing-masing anggota Tim berdasarkan laporan yang ada/studi kepustakaan
- Pemantapan Kesiapan Instrumen Survey / Kajian Lapangan, di sesuaikan dengan kondisi yang akan dihadapi di lapangan dan melengkapi semua instrumen penelitian yang dibutuhkan seperti, : *Panduan Wawancara, Panduan FGD* dan semua kelengkapan untuk observasi dan lain sebagainya
- Koordinasi awal (komunikasi awal) dengan Instansi di Lapangan sebagai lembaga yang pertama di tuju (Dinas-Dinas terkait di

Pemerintah Provinsi / Pemerintah Kabupaten termasuk Badan Pemberdayaan Masyarakat) untuk mendiskusikan waktu yang tepat dilakukannya survey berkaitan dengan kesediaan dari calon-calon informan

- Menjadwalkan pelaksanaan survey /kajian lapangan sesuai informasi awal.
- Pelaksanaan Survey dan Kajian Lapangan pada Lokasi sesuai jadwal.

Pelaksanaan Survey direncanakan untuk selama kurang lebih 10(sepuluh) hari kalender yang sebagian besar akan berada di lokasi studi yaitu Kawasan Transmigrasi di Propinsi Sulawesi Utara, setelah semua persiapan diselesaikan, termasuk sudah dilkukannya kontak awal dengan *key person* di tiap-tiap lokasi.

7.2 Instrumen Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data lapangan (data primer) diperlukan instrumen dan peralatan untuk mendukung kelancaran survey yang disesuaikan dengan teknik dan metode pengumpulan data yang dilakukan. Peralatan-peralatan tersebut dapat berupa panduan, alat perekam, alat mengambil gambar, alat penghitung, alat tulis-menulis, pengeras suara, audio visual dan lain-lain

Beberapa teknik pengumpulan data yang akan dilakukan berikut instrumen kelengkapannya adalah :

7.2.1 Pengamatan (Observasi)

Teknik Observasi / pengamatan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pertama bertindak sebagai pengamat aktif dan yang kedua

selain sebagai pengamat juga melibatkan diri secara aktif dengan melakukan kegiatan seperti yang dilakukan oleh kelompok atau komunitas yang di amati/observasi.

Kegiatan yang akan di observasi antara lain seluruh kawasan sebagai lokasi studi (masyarakat dan sarana dan prasarana) ;

- (1) **Lokasi UPT Transmigrasi:** dimana terdapat proses pemberdayaan yang akan, dan sedang berlangsung dan dalam monitoring yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Pusat, termasuk UPT yang telah diserahkan pengelolaannya Dinas-Dinas Propinsi, Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten , BPM,, Balai-Balai Pemberdayaan dan Proyek Binaan LSM / Lembaga Non Pemerintah.
- (2) **Lokasi Desa Sekitar /Desa Awal:** dimana terdapat masyarakat / komunitas Desa awal (desa sekitar yang masih dalam satu kawasan dan kelembagaannya yang selayaknya menjadi target / sasaran pemberdayaan, baik yang belum, akan, dalam proses, sedang berlangsung maupun yang telah berhasil dalam program pemberdayaan periode lalu.

Dalam Observasi ini peran peneliti menjadi sangat penting karena hanya dengan kejelian, keahlian dan pengalamannya akan dapat menseleksi data dan informasi apa yang akan di dapat dan didokumentasikan. Dalam observasi tidak tertutup kemungkinan

untuk dilanjutkan dengan teknik pengumpulan data yang lain seperti wawancara dan diskusi kelompok.

Dengan demikian instrumen dan peralatan survey seperti yang telah disebutkan di atas akan siap menyertai kemana peneliti/pengamat berada.

7.2.2 Wawancara Mendalam

Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*), yaitu wawancara dengan informan, nara sumber (*pakar*) tentang permasalahan penelitian. Dengan teknik ini peneliti dapat memperoleh informasi secara comprehensive tentang permasalahan dan persepsi serta pandangan dan pendapat informan tentang permasalahan yang tidak bisa didapat dengan teknik pengamatan dan kuesioner. Agar proses wawancara terkendali diperlukan panduan interview sekaligus sebagai seleksi (*checking questions*) tentang prioritas permasalahan yang direncanakan yang perlu mendapat jawaban atau klarifikasi.

Panduan Wawancara Mendalam (*Indepth Interview Guide*) dalam kegiatan ini direncanakan untuk wawancara mendalam dengan ;

- (1) Informan sebagai perwakilan dinas terkait di tingkat provinsi, dinas terkait di tingkat Kabupaten dan Jajaran Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) yang selama ini menangani dan peduli terhadap pengembangan masyarakat transmigrasi;

- (2) Informan yang dipilih dari lembaga non pemerintah /LSM yang peduli dengan pengembangan masyarakat transmigrasi; dan
- (3) Informan dengan tokoh masyarakat ditingkat komunitas dimana sedang berlangsung program pemberdayaan maupun beberapa desa UPT, desa sekitar dalam kawasan masyarakat transmigrasi..

Lampiran VII-1 : Panduan Wawancara Mendalam (Interview Guide) - berfungsi sebagai pegangan bagi pewawancara. Karena sebagai panduan tidak dipertanyakan secara urut, tetapi sangat tergantung dari jawaban informan., terdiri dari daftar permasalahan, materi dan tema-tema tertentu yang akan menjadi masalah pokok penelitian. Diawali dengan pengajuan pertanyaan secara proyektif, kemudian pada jawaban-jawaban tertentu di ikuti dengan pertanyaan yang memfokus dan menyeleksi (*Checking questions*)

7.2.3 Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion)

Diskusi Kelompok Terarah (*FGD*), adalah metode pengumpulan data dengan cara berdiskusi secara terfokus dengan sejumlah informan (*stakeholders*) yang dianggap mengetahui, memahami, pakar, pengamat dan mereka yang mengalami sendiri tentang permasalahan yang diteliti. FGD merupakan metode pengumpulan data yang paling efektif dalam pendekatan kualitatif karena informan atau peserta diskusi dipilih dari mereka yang memahami, mempunyai

- (4) Dalam pelaksanaannya diperlukan seorang moderator, notulis dan perlengkapan diskusi lainnya, yang diawali dengan pengenalan diri dari para peserta.
- (5) Disediakan alat perekam dan dokumentasi
- (6) Di akhir diskusi di sampaikan kesimpulan sementara oleh moderator dan diketahui dan disepakati oleh peserta

Lampiran VII-2 : Panduan FGD (*FGD Guide*) , : berisi daftar sub- topik yang akan didiskusikan sesuai dengan jenis, data dan permasalahan yang akan dicari penyelesaiannya. Sub-topik ini sekaligus sebagai *cek-list* apakah semua masalah telah dibahas dan mendapat tanggapan, opini dari peserta.

7.2.4 Pembahasan/Diskusi di Daerah

Di masing-masing lokasi akan dilakukan pembahasan dengan melibatkan seluruh anggota Tim dan seluruh informan dan nara sumber (Pakar dari Universitas setempat, bila dianggap perlu dan memungkinkan).

Pembahasan dilakukan pada hari terakhir, sekaligus untuk memverifikasi kelengkapan data yang telah dikumpulkan dan mendapat tanggapan dari peserta. Pelaksanaan pembahasan pada tahapan ini dapat mengumpulkan semua informan yang pernah melakukan FGD

Dalam tahapan ini hasil pembahasan yang merupakan pernyataan, pengertian, narasi singkat sebagai hasil analisis awal yang disepakati oleh semua peserta.

7.3 Rencana Survey Institusional

Survey Instansional adalah survey yang dilakukan di instansi pemerintah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Sedangkan instansi yang dituju adalah instansi yang mempunyai tupoksi atau terkait dengan program pemberdayaan pengembangan masyarakat khususnya pengembangan masyarakat transmigrasi.

Dinas Nakertrans, Bappeda, Sosial, PU, Permukiman, Tata Ruang, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), BPS adalah instansi pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten ota yang akan di kunjungi dalam rangka pengumpulan data. Tidak menutup kemungkinan sampai tingkat yang paling rendah (Kecamatan dan Desa) bila sekiranya akan diperoleh data primer yang akurat.

Dari Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat diperoleh data sekunder mengenai segala permasalahan pengembangan masyarakat transmigrasi, Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kelembagaannya, potensi masyarakat, program pembangunan dan pemeberdayaan yang sedang berjalan dan lain sebagainya yang terkait dengan permasalahan pengembangan transmigrasi. Disamping itu juga akan diperoleh data kelembagaan pemerintah, kelembagaan non pemerintah dan kapasitas serta

kinerjanya dalam pelaksanaan program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat transmigrasi.

Sementara itu juga dilakukan survey terhadap lembaga non pemerintah (LSM), Tokoh masyarakat dan masyarakat & kelembagaannya baik sebagai pelaku maupun penerima manfaat program pengembangan masyarakat. Dengan Survey Non Instansional ini akan diperoleh data yang langsung dari mereka yang berkecimpung dalam program pemberdayaan masyarakat yaitu LSM dan lembaga di tingkat komunitas. Informasi langsung dari masyarakat penerima manfaat akan lebih akurat dan dapat dilihat langsung peran partisipasi serta keinginan dari masyarakat.

7.4 Instrumen Pengumpulan Data

Lampiran 1 :

PANDUAN WAWANCARA MENDALAM

(Interview Guide)

1. Target Informan :

1. Wakil dari Dinas-Dinas terkait Pemerintah Provinsi dan Kabupaten (*1-3 informan*)
2. Wakil dari Lembaga Pemerintah Lokal (Kecamatan, Desa, RT/RW (*3-7 informan*)
3. Informan representasi dari LSM / Lembaga Non Pemerin- tah pelaku pemberdayaan (*1-2 informan*)

4. Tokoh / Individu sebagai representasi masyarakat dan kelembagaannya sebagai pelaku sekaligus penerima manfaat program (*2-3 informan di 2-3 lokasi*)

2. Data dan informasi yang diharapkan

Data yang diharapkan adalah *data kualitatif* tentang *sikap, perasaan kondisi, pemahaman, persepsi , dan harapan dari informan /responden* tentang permasalahan pengembangan masyarakat di kawasan trans,igrasi. Hasil yang di Transkrip akan sangat bermanfaat untuk mendukung data-data kuantitaif yang dikumpulkan melalui survey instansional maupun yang diperoleh dari observasi

3. Materi wawancara :

(1) Permasalahan Kawasan Tranmigrasi secara Umum

Apa pendapat Informan tentang kondisi kawasan transmigrasi selama ini. Kapan, mengapa kawasan ini dipilih sebagai kawasan dan bagaimana apakah ada peningkatan, Bagaimana kondisi masyarakat pada umumnya (hidup kerasan, lebih baik) atau bagaimana.?, Bagaimana dengan penyediaan sarana dan prasarana dasar apakah tersedia dari awal, terus dalam proses pembangunan ? Adakah ada kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar antara warga desa dengan desa sekitar ?

(2) Permasalahan Bidang Ekonomi

Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat transmigrasi. Adakah kendala yang signifikan ? Program apa yang dibutuhkan untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat ?

Bagaimana dengan :

- Jenis pekerjaan dan penghasilan masyarakat
- Komoditas yang dihasilkan dan kesesuaian lahan
- Keberadaan dan kualitas serta fungsi sarana dan prasarana dasar
- Akses pasar dan akses permodalan
- Tingkat pendidikan, ketrampilan dan keahlian dikaitkan dengan pekerjaan pokok masyarakat
- Kendala, hambatan dan potensi yang tersedia
- Harapan dan bantuan yang diinginkan

(3) Permasalahan Bidang Sosial Budaya

Bagaimana kualiatat hubungan social budaya internal desa dan eksternal dengan desa lain termasuk desa sekitar, antara lain tentang :

- Hubungan dan interaksi social, integrasi sosial, sert akulturasi budaya dalam satu kawasan
- Layanan pendidikan dan kesehatan internal dan eksternal desa dalam kawasan
- Kerjasama, jaringan kerja, olah raga, seni budaya
- Jaringan social, modal social , trust dan lain-lain

(4) Bidang Mental Spiritual

- Keberagaman kepercayaan dan agama, toleransi dan keberadaan fasilitas ibadah
- Etos kerja, Motivasi kerja dan jiwa kewirausahaan

(5) Bidang Kelembagaan di berbagai level

- adakah kelembagaan di tingkat desa/komunitas telah berfungsi optimal
- Bagaimana dengan kelembagaan di tingkat yang lebih tinggi ditingkat kecamatan dan kabupaten bersinerji dengan masyarakat ?
- Adakah kelembagaan ekonomi yang dapat membantu seperti Kelompok Usaha Bersma, Koperasi dll
- Lembaga-lembaga apa yang sudah terlibat dalam pembangunan perumahan swadaya ? Lembaga apa yang belum terlibat dan seharusnya terlibat dalam pemberdayaan perumahan swadaya ?

(6) Bidang Keamanan

- Bagaimana kondisi keamanan kawasan pada umumnya?
- Adakah sering terjadi konflik antar warga, antara desa?
- Bagaimana dengan tingkat kejahatan dan kerawanan sosial selama ini?
- Bagaimana keamanan kawasan dibanding dengan tingkat keamanan pada tataran yang lebih luas (kabupaten, propinsi maupun nasional)?.

4. Pelaksanaan dan Mekanisme Wawancara

Untuk mendapatkan data yang otentik dan akurat dalam proses wawancara haruslah langsung dibuatkan transkrip, disamping dilakukan perekaman untuk memastikan keakuratan dan sekaligus melengkapi informasi yang terlewatkan.

Lampiran 2 :

PANDUAN DISKUSI KELOMPOK TERARAH

(FGD Guide)

1. Data dan Informasi FGD

Data dan informasi yang dapat dikumpulkan melalui FGD sama saja seperti dalam wawancara, tetapi dalam FGD sudah *diarahkan* kepada identifikasi dan analisis serta sudah menunjuk pada kebutuhan **program** sesuai dengan prioritas. Dengan demikian dalam FGD akan banyak mendiskusikan tentang **kendala, hambatan, kelemahan dan potensi** serta **alternative kebijakan dan program aksi yang dibutuhkan.**

2. Sub Topik dan Materi FGD

1. Permasalahan Bidang Ekonomi

- Identifikasi Kendala dan kelemahan yang ada
- Identifikasi Potensi yang dapat mendorong
- Formulasi Alternatif Solusi dan Program
- Pemilihan Program dan menyusun urutan prioritas

2. Permasalahan Bidang Sosial Budaya

- Identifikasi Kendala dan kelemahan yang ada

-
- Identifikasi Potensi yang dapat mendorong
 - Formulasi Alternatif Solusi dan Program Kebijakan
 - Pemilihan Program dan menyusun urutan prioritas

3. Permasalahan Bidang Mental Spiritual

Identifikasi kekuarangan dan potensi untuk menyusun program alternative yang dapat dipilih sesuai kondisi

4. Permasalahan Bidang Kelembagaan

Identifikasi keberadaan, fungsi dan kemungkinan pembentukan lembaga yang sangat dibutuhkan berikut pelatuhan-pelatihan yang dapat mendorong masyarakat untuk berorganisasi

- *Profile kelembagaan, Hambatan yang sering timbul,*
- *Kapasitas SDM,*
- *Bentuk fasilitasi yang diharapkan*
- *Pengalaman melaksanakan program pemberdayaan*

5. Permasalahan Bidang Keamanan

- *Profil masyarakat dan kelembagaan internal,*
- *Peran dan partisipasi mereka*
- *Peranan Tokoh Masyarakat (adat, agama dll)*
- *Harapan dari adanya program pembangunan*

Lampiran 3

**PENYUSUNAN RENCANA KERANGKA
WILAYAH PENGEMBANGAN TRANSMIGRASI/LOKASI
PERMUKIMAN TRANSMIGRASI**

**DAFTAR ISI/KONDISI EKSISTING DAN POTENSI
WPT/LPT**

Nama Desa :

Identitas Lokasi Potensial*) :

Kecamatan :

Kabupaten :

Provinsi :

Monografi Desa : terlampir/tidak**)

*) pemberian identitas oleh enumerator

**) Coret yang tidak perlu

DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI

2008

I. KONDISI OBYEKTIF

1. Aksesibilitas

a. Akses Lokasi dengan Pusat-pusat Pertumbuhan Eksisting

Akses ke Lokasi Dari	Jarak (km)	Waktu tempuh (jam)	Jenis Jalan	Kondisi Jalan	Sarana Transportasi	Biaya (Rp/orang/PP)
Ibu Kota Provinsi						
Ibu Kota Kabupaten						
Ibu Kota Kecamatan						
Pasar Terdekat						
Desa terdekat						

b. Kondisi Jalan Penghubung, Jalan Desa, Jalan Kabupaten, Jembatan

No	Uraian	Kondisi factual
1	Jalan penghubung	
	a. Ukuran	
	b. Kualitas jalan	
2	Jalan Desa	
	a. Ukuran	
	b. Kualitas jalan	
3	Jembatan di jalan menuju lokasi	
4	Jalan Kabupaten	

2. Status dan Legalitas Lahan

a. Rincian Status Lahan di Lokasi Potensial

No	Jenis lahan	Ha	%
1	Tanah Adat/masyarakat		
2	Hak Pengelolaan		

	Transmigrasi		
3	APL		
4	Hutan Produksi		
5		
6		
	Luas Total Desa		100

b. Luas Lahan Berdasarkan Peruntukannya Pada Rencana Tata ruang

Wilayah Kabupaten

No	Peruntukan	Luas (Ha)
1	Kawasan Budidaya	
2	Hutan Produksi	
3	
4	

3. Kondisi Agroekologi

a. Iklim

(1) Ketinggian di atas permukaan laut m dpl dengan suhu rata-rata

(2) Curah hujan mm/tahun

(3) Bulan basah selama bulan, terjadi pada bulan hingga

(4) Bulan kering selama bulan, terjadi pada bulan hingga bulan

b. Jenis tanah : 1) Gambut

2) Mineral.....

c. pH tanah :

d. Contoh tanah yang diambil

No	Kode Contoh	Lokasi Pengambilan	Koordinat Lokasi	Keterangan Lain
1				
2				

4. Luas Lahan Berdasarkan Topografi

No	Kemiringan Lahan	Luas (Ha)	(%)
1	0 – 3 %		
	a. Drainase baik		
	b. Drainase terhambat		
2	>3 – 8 %		
3	>8 – 15 %		
4	>15 – 40 %		
5	> 40 %		
	<i>Jumlah</i>		

5. Kondisi Lahan Rawa

a. Tipologi lahan

1) Untuk lahan rawa (*coret yang tidak sesuai*)

(a) Pasang surut dengan tipe genangan

(b) Rawa Lebak Dangkal

(c) Rawa Lebak Tengahan

2) Untuk lahan gambut:

a) Kedalaman gambut : - m

b) Tipe gambut : Fibrik/Hemik/Saprik (*coret yang tidak sesuai*)

3) Untuk lahan pasang surut:

a) Kedalaman lapisan pirit : -m

b) Kondisi lapisan pirit : Telah/belum teroksidasi

b. Kondisi air tanah di musim kemarau : dangkal/dalam

II. POTENSI SOSIAL-EKONOMI

1. Struktur Kependudukan Desa

No	Usia	Pria	Wanita	Jumlah
	0 – 10 tahun			
	10 – 20 tahun			
	20 – 30 tahun			
	30 – 40 tahun			
	40 – 50 tahun			
	50 – 60 tahun			
	> 60 tahun			

2. Kepadatan Penduduk Desa

.....jiwa/km²

3. Mata Pencaharian Penduduk Desa

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk (orang)	Kisaran pendapatan (Rp/tahun)
1	Pegawai negeri		
2	Petani		
3	Pengrajin tahu-tempe		
4	Pengrajin anyaman		
5	Bengkel sepeda/sepeda motor		
6	Warung kelontong		
7	Pencari kayu		
8.	Dagang		
9	Buruh tani		
10	Buruh bangunan		
11	Tukang pijat		
12		
13		

4. Luas lahan, rata-rata Produksi, dan harga komoditas pertanian.

No	Komoditas	Luas Lahan (ha)	Produksi (ton/ha)	Harga produksi (Rp/Kg)	
				Di lokasi	Pasar terdekat
A	Tanaman Semusim				
1	Padi				
2	Jagung				
3	Kacang Tanah				
4	Kedelai				
5				
B	Tanaman Tahunan				
1	Kelapa sawit				
2	Karet				
3				

5. Luas lahan, rata-rata Produksi, dan harga komoditas pertanian

No	Jenis Ternak	Luas Lahan (ha)	Produksi (Kg)	Harga produksi (Rp/Kg)	
				Di lokasi	Pasar terdekat
1	Ayam				
	Daging				
	Telur				
2	Itik				
	Daging				
	Telur				
3	Kambing				
4	Sapi Pedaging				
5	Sapi Perah				
6				
	...				
7				
8				

6. Permasalahan produksi, penanganan lepas panen dan Pemasaran

Komoditas Utama

No	Komoditas	Produksi	Penanganan lepas panen	Kesulitan

7. Harga Input Produksi Pertanian & Peternakan

No	Jenis Barang	Satuan	Harga Rp/satuan)
1	Bibit		
2	Pupuk		
	- Urea		
	- KCL		
	- TSP		
3	Pestisida		
4	Dolomit		
5	Pakan Ternak		
6	Obat-obatan ternak		
7	Upah buruh harian		

8. Harga Kebutuhan Bahan Pokok

No	Jenis Barang	Satuan	Harga Rp/satuan)
1	Beras	Kg	
2	Garam	Kg	
3	Gula pasir		
4	Minyak goreng		
5	Minyak tanah		
6	Terigu		
7		

9. Arus Barang Keluar

No	Jenis Barang	Harga (Rp/satuan)	Daerah Tujuan Pemasaran	Moda Transportasi
1			
2			
3			
4			
5			

10. Arus Barang Masuk

No	Jenis Barang	Harga (Rp/satuan)	Daerah Asal Barang	Moda Transportasi
1			

2			
3			
4			
5			

9. Kelembagaan Ekonomi

1. KUD

a. Nama KUD :

b. Tanggal Berdiri :

c. Badan Hukum :

d. Kegiatan : 1.
2.....
3
.....

e. Kegiatan yang :
masih aktif

III. KONDISI SARANA DAN PRASARANA DESA

1. Sarana dan Prasarana Pendidikan

No	Prasarana dan Sarana	Jumlah	Kondisi
1	Bangunan Sekolah Dasar		
2	Rumah guru		
2	Guru		
3	Buku pelajaran		

2. Sarana dan Prasarana Kesehatan

No	Prasarana dan Sarana	Jumlah	Kondisi*)
1	Bangunan Balai Pengobatan		
2	Rumah petugas kesehatan		
3	Obat-obatan		
4	Pencegahan penyakit, misal Penyemprotan nyamuk malaria		
5	Petugas kesehatan		
	a. Dokter		
	b. Bidan		
	c. Perawat/Mantri		
	d. Dukun		
	e. Petugas PLKB		
6	Peralatan		
	a. Peralatan medis		
	1) Timbangan		
	2) Stetoskop		
	3) Tensimeter		
	4) Alat infus		
	c. Peralatan non medis		
	1) Meja pemeriksaan		
	2) Meja/kursi		
		
7	Jaminan rawat inap di Rumah sakit bagi yang sakit dan memerlukan rawat inap		

Khusus petugas, diisi domisili dan frekuensi kunjungan

3. Sarana dan Prasarana Desa

No	Jenis bangunan	Jumlah	Kondisi
1	Gudang		
2	Gedung KUD		
3		
4		

4. Sarana dan Prasarana Pemerintahan dan Pembinaan

1. Bangunan

No	Jenis Bangunan	Jumlah	Kondisi
1	Balai Desa		
2		

2. Petugas

No	Petugas Pemerintahan	Jumlah	Domisili
	a. Kepala Desa		
	b. Sekretaris Desa		
	c. BPD/LKMD		
		
		

IV. POTENSI SUMBERDAYA MANUSIA

1. Pendidikan dan Keterampilan Penduduk

a. Indikator

No	Indikator	Satuan	Kondisi Faktual
1	Jumlah Anak usia SD (7-12 tahun)	Orang	
2	Jumlah Anak usia SMP (13-15 th)	orang	
3	Partisipasi pendidikan SD dan SMP (<i>catatan : Partisipasi pendidikan adalah persentase jumlah anak usia SD dan SMP (7-15) yang sedang bersekolah terhadap jumlah anak usia SD dan SMP</i>)	%	
3	Angka melek huruf (<i>catatan : angka melek huruf adalah persentase jumlah orang dewasa yang yang bisa baca tulis terhadap jumlah orang dewasa</i>)	%	

b. Pendidikan KK dan Istri

No	Pendidikan	Suami (orang)	Istri (orang)
1	Tidak sekolah		
2	SD		
3	SMP		
4	SMA		
5	Diploma 1		
6	Diploma2/Sarjana Muda		
7	Sarjana		

c. Keterampilan KK dan Istri

No	Kursus	Jumlah Trans

2. Kesehatan

No	Uraian	Kondisi Faktual
1	Wabah penyakit	*)
2	Rasio Kematian Balita (Catatan : Rasio Kematian Balita adalah jumlah balita meninggal dibanding jumlah balita yang ada)	
3	Prevalensi Penyakit (catatan : Prevalensi Penyakit adalah jumlah orang sakit hingga tidak dapat melakukan aktivitas kerja dalam satu hari atau lebih dibanding jumlah penduduk)	

*) Ada atau tidak. Jika ada sudah dapat ditanggulangi atau belum

3. Perekonomian

No	Uraian	Satuan	Kondisi Faktual
1	Pendapatan	Rp/KK	
2	Pesentase keluarga miskin miskin	orang	
3	Persentase keluarga miskin	KK	
4	Tingkat pelayanan KUD	orang	

6. Sosial Budaya

No	Uraian	Kondisi Faktual
1	Ada tidaknya konflik akibat SARA	
2	Modal sosial	
	a. Perilaku	
	b. Organisasi Sosial*)	
	1) Gotong royong	
	2) Olah raga	
	3) Keagamaan	
	4) Kematian	
	5) ...	
3.	Jumlah kriminal yang terjadi satu tahun terakhir	
4	Jumlah penduduk memiliki	

*) Uraikan jumlah dan keaktifannya

Lampiran 4



**PENYUSUNAN RENCANA KERANGKA
WILAYAH PENGEMBANGAN TRANSMIGRASI/LOKASI
PERMUKIMAN TRANSMIGRASI**

KUESIONER UNTUK MASYARAKAT

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

Nama Responden :

No Responden :

DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI

2008

I. INTEGRASI DENGAN PENDUDUK SETEMPAT

1. Bagaimana hubungan dengan penduduk asli di sekitar lokasi ?

☐ Baik ☐ Biasa ☐ Tidak baik

Catatan tambahan untuk jawaban pertanyaan

ini.....

b) Apakah pernah terjadi konflik dengan Penduduk Setempat ?

☐ Pernah ☐ Tidak Pernah ☐ Tidak Tahu

Catatan tambahan untuk jawaban pertanyaan

ini.....

II. PERSEPSI TERHADAP AKSESIBILITAS

1. Untuk pergi keluar dari desa ini menuju pusat pelayanan (pasar, kota kecamatan), menurut bapak/ibu apakah mudah atau sulit ?

☐ Sangat Mudah ☐ Mudah ☐ Sulit

Catatan tambahan untuk jawaban pertanyaan

ini.....

III. PENDIDIKAN

1. Apakah pelayanan pendidikan di wilayah ini Bapak/Ibu nilai baik atau buruk ?

☐ Baik ☐ Cukup ☐ Buruk

Catatan tambahan untuk jawaban pertanyaan ini.....

2. Tingkat Pendidikan anggota keluarga

No	Status*)	Umur (tahun)	Pendidikan Terakhir	Satus sekolah saat ini
1	Suami			
2	Istri			
3	Anak			
4	Anak			
5	Anak			
6	Anak			
7			
8			

*) Yang masih hidup

IV. KESEHATAN

1. Apakah pelayanan kesehatan di wilayah ini Bapak/Ibu nilai telah baik atau buruk ?

☐ Baik

☐ Cukup

☐ Buruk

Catatan tambahan untuk jawaban pertanyaan ini.....

2. Jumlah anggota keluarga yang sakit satu tahun terakhir hingga tidak mampu bekerja/sekolah dalam jangka waktu satu hari atau lebih

a. orang sakit kali

b. orang sakit kali

c. orang sakit kali

3. Jumlah anggota keluarga balita yang meninggal satu tahun terakhir anak.

V. EKONOMI

1. Apakah untuk memperoleh kebutuhan pokok di wilayah ini menurut

Bapak/Ibu cukup mudah atau sulit ?

☐ Sangat Mudah

☐ Mudah

☐ Sulit

Catatan tambahan untuk jawaban pertanyaan
ini.....

2. Produktivitas dan biaya produksi komoditas utama

No	Komoditas utama	Biaya produksi (Rp/ha)	Rata-rata produksi/ha
1			
2			
3			
4			

3. Matapencaharian dan Pendapatan bersih per tahun

No	Matapencaharian	Pendapatan (Rp/ /KK/th)
1	Usahatani Tanaman pangan	
2	Usahatani Tanaman perkebunan	
3	Ternak	
4	Ikan	
5	Warung	
6	Dagang	
7	Buruh	
8	Lainnya	

4. Pengeluaran satu tahun terakhir (di luar biaya produksi)

No	Jenis Pengeluaran	Jumlah	
		Rp/KK/bln	Rp/KK/th
1	Bahan makanan		
	a. Beras		
	b. Ubi-ubian		
	c. Kacang-kacangan		
	d. Lauk-pauk (tempe, telur, daging, ikan)		
	d. Minyak sayur		
	e. Sayuran		
	f. Bumbu		
	g. Air		
	h.		
2	Saudang dan papan		
	a. Pakaian		
	b. Perumahan		
	c. Perabotan rumah tangga		
	d.		
3	Pendidikan dan Kesehatan		
	a. Biaya sekolah		
	b. Biaya berobat		
4.	Tabungan dan investasi		
	a. Tabungan uang		
	b. Membeli emas		
	c. Membeli tanah		
	d. Membeli kendaraan		
	e.		
5	Lain-lain		
	a. Rekreasi		
	b. Pulang kampung		
	c. Bepergian dlm rangka suatu keperluan		
	d. Rokok		
	e. Minyak tanah .		
	f. Sabun.....		
	g. Iuran		

Lampiran 5**KONSEP****OUTLINE LAPORAN AKHIR**

- BAB I PENDAHULUAN**
- BAB II KAJIAN KONSEP PENGEMBANGAN MASYARAKAT**
- BAB III GAMBARAN UMUM DAN KARAKTERISTIK KAWASAN
STUDI**
- BAB IV IDENTIFIKASI DAN ANALISIS**
- BAB V IDENTIFIKASI ALTERNATIF PROGRAM**
- BAB VI RENCANA TEKNIS PENGEMBANGAN MASYARAKAT DI
KAWASAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI UTARA**
- BAB VII PROGRAM TAHUNAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
DI KAWASAN TRANSMIGRASI PROVINSI
SUKLAWESI UTARA**
- BAB VIII REKOMENDASI**

BAB VIII

IDENTIFIKASI DAN DESKRIPSI DATA

Pemukiman transmigrasi Kabupaten Minahasa Tenggara Propinsi Sulawesi Utara terdiri dari dua kecamatan dan 4 UPT yaitu :

1. Kecamatan Toluaan terdiri dari 3 UPT yaitu UPT Lowatag, UPT Pisa, UPT Suhuyon
2. Kecamatan Tombatu terdiri dari 1 UPT yaitu UPT Betelen

8.1. Perkembangan Penduduk

Perkembangan penduduk pada keempat UPT di Kabupaten Minahasa Tenggara Propinsi Sulawesi Utara ditentukan dengan adanya angka kelahiran, kematian, pecahan KK, penduduk spontanitas mengikuti keluarga dan atau penduduk yang meninggalkan lokasi transmigrasi, sejak penempatan tahun 2003 sampai dengan bulan Juni tahun 2007 telah terjadi perkembangan/mutasi penduduk sebagai berikut :

a. Pada UPT Betelen :

- Penempatan awal : 100 KK = 448 jiwa
- Kelahiran awal : 25 jiwa
- Kematian : 3 jiwa
- Meninggalkan Lokasi : 16 KK = 65 jiwa
- Transmigran Pengganti : 16 KK = 114 jiwa
- Transmigran Spontan : 1 KK = 5 jiwa

(Penduduk datang dan menetap bersama dengan keluarga)

- Jumlah penduduk Sekarang : 101 KK = 524 jiwa

b. Pada UPT Pisa :

- Penempatan awal : 75 KK = 306 jiwa
- Kelahiran : 26 jiwa
- Kematian : 2 jiwa
- Perkawinan : 2 KK = 6 jiwa
- Meninggalkan Lokasi : 3 KK = 11 jiwa
- Transmigran Pengganti : 3 KK = 8 jiwa
- Transmigran Spontan : 18 KK = 79 jiwa

(Penduduk yang sudah berada di lokasi sejak lokasi belum dibuka sampai menjadi lokasi transmigrasi)

- Jumlah Penduduk Sekarang : 95 KK = 411 jiwa

c. Pada UPT Suhuyon :

- Penempatan awal : 75 KK = 276 jiwa
- Kelahiran : 4 jiwa
- Kematian : 2 jiwa
- Perkawinan : 6 KK = 12 jiwa
- Meninggalkan Lokasi : - KK = - jiwa
- Transmigran Pengganti : - KK = - jiwa
- Transmigran Spontan : 10 KK = 59 jiwa

(Penduduk yang sudah berada di lokasi sejak lokasi belum dibuka sampai menjadi lokasi transmigrasi)

- Jumlah penduduk Sekarang : 91 KK = 361 jiwa

d. Pada UPT Lowatag :

- Penempatan awal : 50 KK = 204 jiwa
- Kelahiran : 5 jiwa
- Kematian : 2 jiwa
- Perkawinan : 1 KK = 2 jiwa
- Meninggalkan Lokasi : 7 KK = 26 jiwa
- Transmigran Pengganti : - KK = - jiwa
- Transmigran Spontan : 75 KK = 367 jiwa

(Penduduk yang sudah berada di lokasi sejak lokasi belum di buka sampai menjadi lokasi transmigrasi)

- Mengunjungi keluarga : 45 KK = 212 jiwa
- Jumlah Penduduk Sekarang : 74 KK = 338 jiwa

8.2. Struktur Penduduk

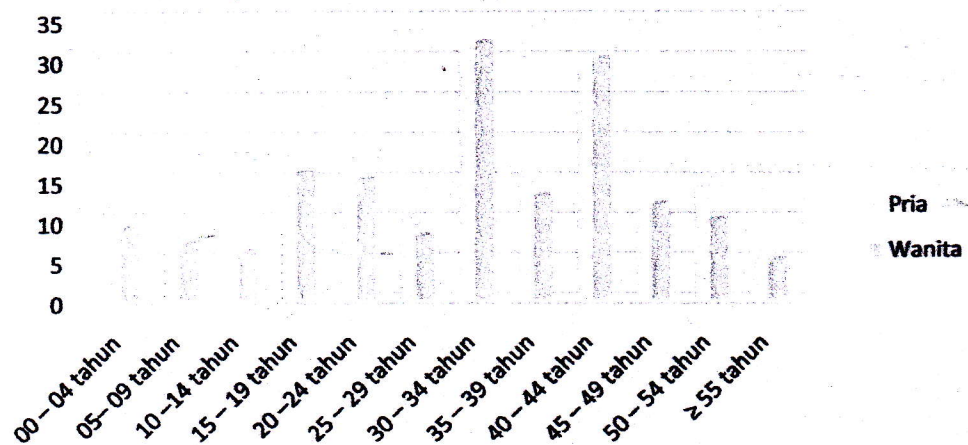
Struktur dan kondisi penduduk baik menurut klasifikasi umur maupun jenis kelamin pada keempat UPT di Kabupaten Minahasa Tenggara Propinsi Sulawesi Utara disajikan pada tabel-tabel berikut.

Tabel 1 : Data Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin UPT Lowatag

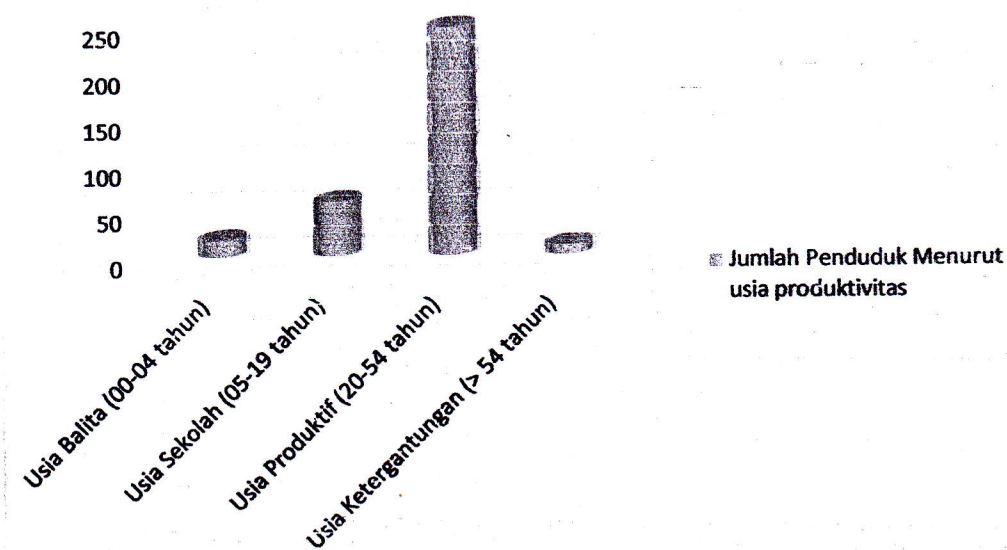
No	Usia	Pria	Wanita	Jumlah
1	00 – 04 tahun	10	9	19
2	05– 09 tahun	11	7	18
3	10 –14 tahun	7	6	13
4	15 – 19 tahun	13	16	29
5	20 –24 tahun	18	15	33
6	25 – 29 tahun	10	8	18
7	30 – 34 tahun	31	32	63

No	Usia	Pria	Wanita	Jumlah
8	35 – 39 tahun	16	13	29
9	40 – 44 tahun	28	30	58
10	45 – 49 tahun	11	12	23
11	50 – 54 tahun	14	10	24
12	≥ 55 tahun	6	5	11
	Jumlah	175	163	338

Dari tabel 1 di atas dapat disimpulkan bahwa warga transmigran di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Lowatag usia balita sebesar 19 jiwa atau 5,621%, usia sekolah (5 – 19 tahun) sebanyak 60 jiwa atau 17,752%, usia produktif (20 - 54 tahun) sebanyak 248 jiwa atau 73,377%, dan usia di atas 55 tahun yang merupakan usia ketergantungan sebanyak 11 jiwa atau 3,254%. Berikut grafik keadaan penduduk yang dikelompokkan berdasarkan umur dan jenis kelamin.



Gambar 1. Data Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin UPT Lowatag



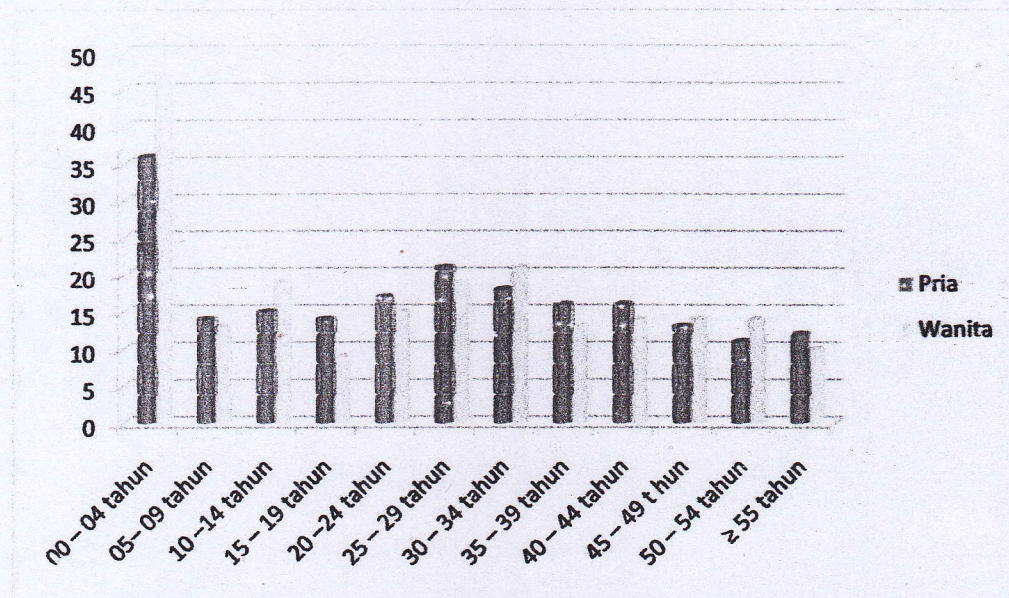
Gambar 2. Data Penduduk menurut Kelompok Usia Produktif UPT Lowatag

Tabel 2 : Data Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin UPT Pisa

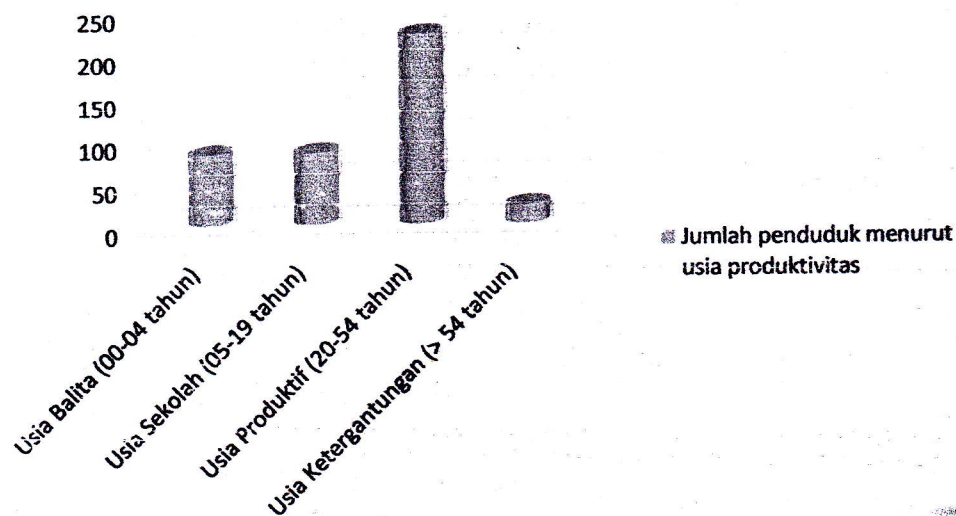
No	Usia	Pria	Wanita	Jumlah
1	00 – 04 tahun	36	47	83
2	05– 09 tahun	14	13	27
3	10 –14 tahun	15	19	34
4	15 – 19 tahun	14	9	23
5	20 –24 tahun	17	15	32
6	25 – 29 tahun	21	19	40
7	30 – 34 tahun	18	21	39
8	35 – 39 tahun	16	13	29
9	40 – 44 tahun	16	14	30
10	45 – 49 t hun	13	14	27
11	50 – 54 tahun	11	14	25
12	≥ 55 tahun	12	10	22
	Jumlah	203	208	411

Dari tabel 2 di atas dapat disimpulkan bahwa warga transmigran di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Pisa, usia balita sebanyak 83 jiwa atau 20,195 %,

usia sekolah (5 – 19 tahun) sebanyak 57 jiwa atau 13,869 %, usia produktif (20 – 54 tahun) sebanyak 222 jiwa atau 54,015 %, dan usia 55 tahun ke atas yang merupakan usia ketergantungan sebanyak 22 jiwa atau 5,353 %. Berikut grafik keadaan penduduk yang dikelompokkan berdasarkan umur dan jenis kelamin.



Gambar 3. Data Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
UPT Pisa



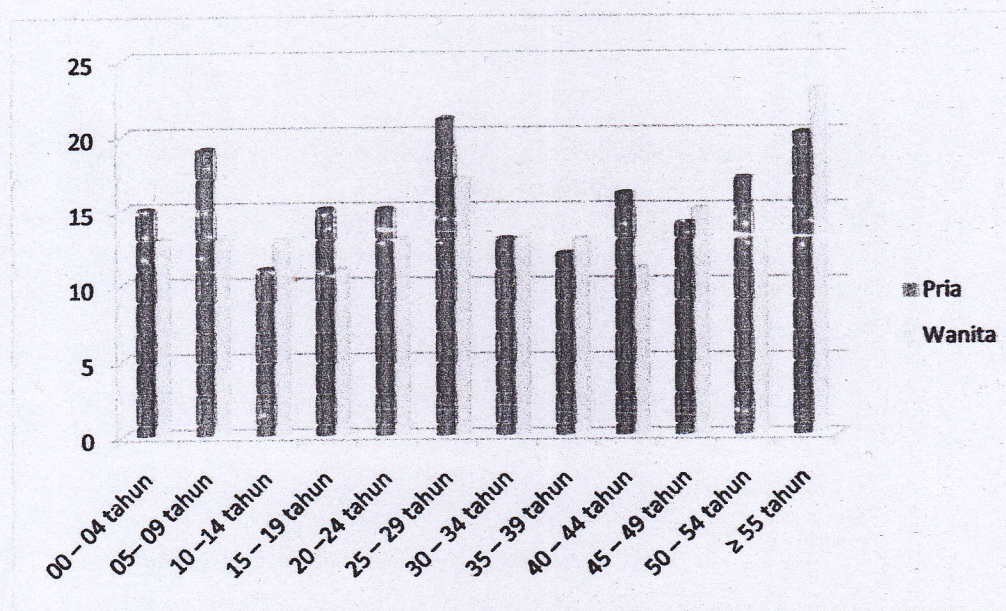
Gambar 4. Data Penduduk menurut Kelompok Usia Produktif UPT Pisa

Tabel 3 : Data Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin UPT Suhuyon

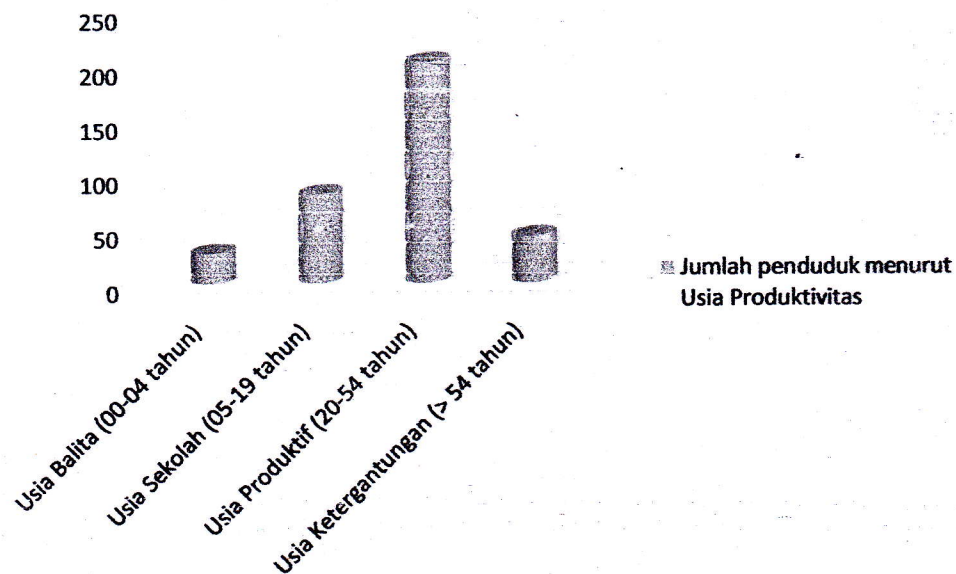
No	Usia	Pria	Wanita	Jumlah
1	00 – 04 tahun	15	13	28
2	05 – 09 tahun	19	13	32
3	10 – 14 tahun	11	13	24
4	15 – 19 tahun	15	11	26
5	20 – 24 tahun	15	13	28
6	25 – 29 tahun	21	17	38
7	30 – 34 tahun	13	13	28
8	35 – 39 tahun	12	13	25
9	40 – 44 tahun	16	11	27
10	45 – 49 tahun	14	15	29
11	50 – 54 tahun	17	13	30
12	≥ 55 tahun	20	23	43
	Jumlah	191	170	361

Dari tabel 3 di atas dapat disimpulkan bahwa warga transmigran di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Suhuyon terdiri dari usia balita sebanyak 28 jiwa

atau 7,756 %, usia sekolah (5 – 19 tahun) sebanyak 82 jiwa atau 22,714 %, usia produktif (20 – 54 tahun) sebanyak 205 jiwa atau 56,786 %, dan usia 55 tahun ke atas yang merupakan usia ketergantungan sebanyak 43 jiwa atau 11,911 %. Berikut grafik keadaan penduduk yang dikelompokkan berdasarkan umur dan jenis kelamin.



Gambar 5. Data Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
UPT Suhuyon



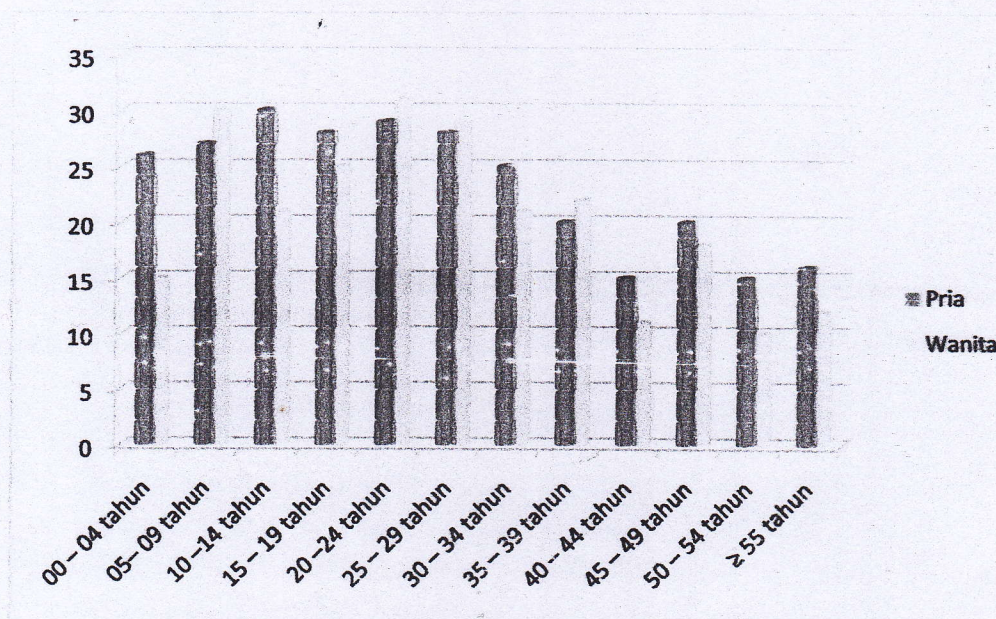
Gambar 6. Data Penduduk menurut Kelompok Usia Produktif UPT Suhuyon

Tabel 4 : Data Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin UPT Betelin

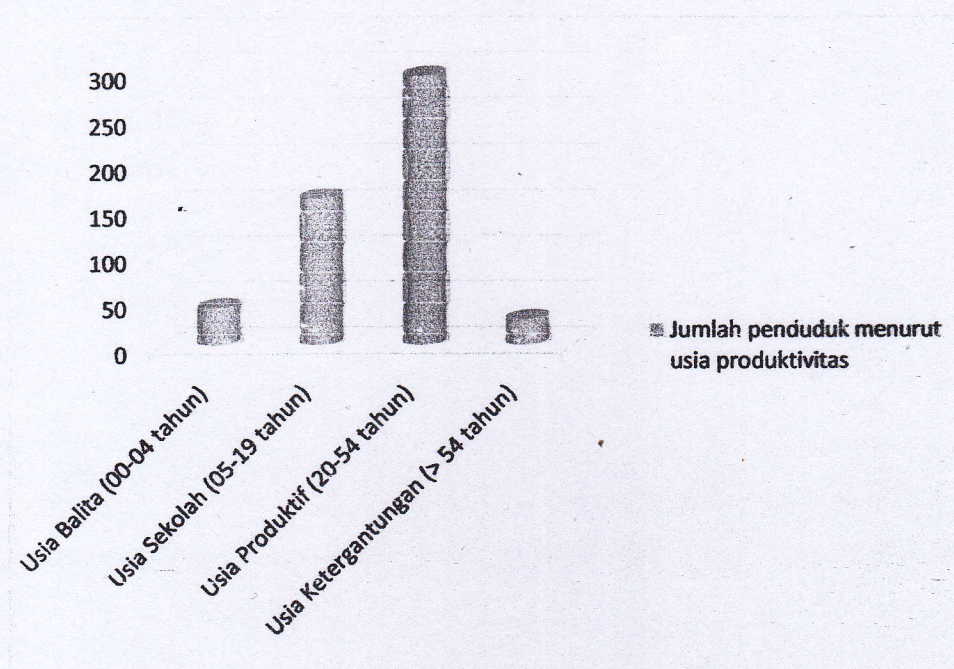
No	Usia	Pria	Wanita	Jumlah
1	00 – 04 tahun	26	15	41
2	05– 09 tahun	27	30	57
3	10 –14 tahun	30	21	51
4	15 – 19 tahun	28	25	53
5	20 –24 tahun	29	31	60
6	25 – 29 tahun	28	29	57
7	30 – 34 tahun	25	21	46
8	35 – 39 tahun	20	22	42
9	40 – 44 tahun	15	11	26
10	45 – 49 tahun	20	18	38
11	50 – 54 tahun	15	10	25
12	≥ 55 tahun	16	12	28
	Jumlah	279	245	524

Dari tabel 4 di atas dapat di simpulkan bahwa warga transmigran di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Betelen terdiri dari usia balita sebanyak 41 jiwa atau 7,824 %, usia sekolah (5 – 19 tahun) sebanyak 161 jiwa atau 30,725 %, usia

produktif (20 – 54 tahun) sebanyak 322 jiwa atau 61,450 %, dan usia 55 tahun ke atas (usia ketergantungan) sebanyak 28 jiwa atau 5,343 %. Berikut grafik keadaan penduduk yang dikelompokkan berdasarkan umur dan jenis kelamin.



Gambar 7. Data Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
UPT Betelin



Gambar 8. Data Penduduk menurut Kelompok Usia Produktif UPT Betelin

8.3. Kepadatan Penduduk Desa

Kepadatan penduduk pada masing-masing UPT di Kabupaten Minahasa

Tenggara Propinsi Sulawesi Utara dirumuskan sebagai berikut :

1. Kepadatan penduduk Unit Pemukiman Transmigrasi Lowatag adalah
 $388 : 35.990 = 0,011 \text{ jiwa/km}^2$ (1 orang per 1 km^2)
2. Kepadatan penduduk Unit Pemukiman Transmigrasi Pisa adalah
 $441 : 28.125 = 0,016 \text{ jiwa/ km}^2$ (1 orang per 1 km^2)
3. Kepadatan penduduk Unit Pemukiman Transmigrasi Suhuyon adalah
 $361 : 32.812 = 0,011 \text{ jiwa/ km}^2$ (1 orang per 1 km^2)
4. Kepadatan penduduk Unit Pemukiman Transmigrasi Betelin adalah
 $524 : 424,5 = 1,234 \text{ jiwa/ km}^2$ (2 orang per 1 km^2)

8.4 Mata Pencaharian Penduduk Unit Pemukiman Transmigrasi Kabupaten

Minahasa Tenggara

Mata Pencaharian Penduduk pada keempat Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) di Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai berikut :

1. Mata Pencaharian Penduduk Unit Pemukiman Transmigrasi Lowatag

Penduduk UPT Lowatag pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani, sebagian beternak yaitu beternak sapi, babi, anjing, ayam, itik, perikanan darat dan terdapat beberapa penduduk yang menambah kegiatannya pada industri dan jasa rumah tangga yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Seperti data yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel. 5. Data Mata Pencaharian UPT Lowatang

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk	Kisaran pendapatan (Rp/tahun)
1	Pegawai negeri	-	-
2	Petani	50 kk	-
3	Pengrajin tahu-tempe	-	-
4	Pengrajin anyaman	-	-
5	Bengkel sepeda/sepeda motor	-	-
6	Warung kelontong	5 orang	-
7	Pencari kayu	-	-
8.	Dagang	-	-
9	Buruh tani	-	-
10	Buruh bangunan	-	-
11	Tukang pijat	-	-
12	Pembuatan gula aren / batu	47 orang	-
13	Pembuatan cap tikus	6 orang	-
14	Pembuatan bata	4 orang	-

Dari data pada tabel 5 di atas menunjukkan bahwa penduduk UPT Lowatang 100% mata pencahariannya adalah bertani yaitu sebanyak jumlah

kepala keluarga pada UPT Lowatang. Selain bertani, warga transmigran UPT Lowatag juga melakukan usaha di bidang industri pembuatan gula aren yaitu sebanyak 47 orang dari jumlah penduduk UPT Lowatang atau sebanyak 23,04 %, membuka usaha di bidang warung kelontong sebanyak 5 orang atau 2,4 %, usaha pembuatan cap tikus sebanyak 6 orang atau 2,9 %, usaha pembuatan batu bata sebanyak 4 orang atau 1,96% dari seluruh penduduk yang terdapat di UPT Lowatang.

2. Mata Pencarian Penduduk Unit Pemukiman Transmigrasi Pisa

Warga transmigran pada UPT Pisa pada umumnya bermata pencarian sebagai petani, dan sebagian beternak sapi, anjing, ayam, perikanan darat dan terdapat beberapa penduduk yang menambah kegiatannya pada bidang industri dan jasa rumah tangga untuk peningkatan kesejahteraan. Seperti data yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel. 6. Data Mata Pencarian UPT Pisa

No	Jenis Mata Pencarian	Jumlah Penduduk	Kisaran pendapatan (Rp/tahun)
1	Pegawai negeri	-	-
2	Petani	75 KK	-
3	Pengrajin tahu-tempe	-	-
4	Pengrajin anyaman	-	-
5	Bengkel sepeda/sepeda motor	-	-
6	Warung kelontong	2 orang	-
7	Pencari kayu	-	-
8.	Dagang	-	-
9	Buruh tani	-	-
10	Buruh bangunan	-	-
11	Tukang pijat	-	-
12	Tukang Kayu	15 orang	-
13	Tukang Batu	10 orang	-
14	Tukang Jahit	7 orang	-
15	Tukang Krepek	5 orang	-

16	Mebuler	6 orang	-
17	Angkutan Ojek	5 orang	-
18	Pembuat Gula Batu	20 orang	-
19	Pembuat Cap Tikus	3 orang	-
20	Pembuat Kue	3 orang	-

Dari data pada tabel 6 di atas menunjukkan bahwa warga transmigran di UPT Pisa sebanyak 89,3% adalah Petani dari total jumlah kepala keluarga yang terdapat pada UPT Pisa. Selain Bertani, warga transmigran di UPT Pisa membuat industri pembuatan gula aren yaitu sebanyak 20 orang dari jumlah penduduk UPT Pisa atau 3,8 %, warung klontong sebanyak 2 orang atau 0,4 %, pembuatan cap tikus sebanyak 3 orang (0,57%). Selain itu beberapa warga transmigran bermata pencaharian sebagai tukang kayu, tukang batu, tukang jahit, tukang krepek masing-masing sebanyak 15, 10, 7, 5 orang dari seluruh penduduk transmigran di UPT Pisa.

3. Mata Pencaharian Penduduk Unit Pemukiman Transmigrasi Suhuyon

Warga transmigran pada UPT Suhuyon pada umumnya adalah petani, sebagian beternak sapi, babi, ayam, itik, dan terdapat beberapa warga transmigran UPT Suhuyon yang menambah kegiatannya pada bidang industri dan penyediaan jasa rumah tangga untuk peningkatan kesejahteraannya, seperti data yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel. 7. Data Mata Pencaharian UPT Suhuyon

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk	Kisaran pendapatan (Rp/tahun)
1	Pegawai negeri	-	-
2	Petani	75 kk	-
3	Pengrajin tahu-tempe	-	-
4	Pengrajin anyaman	-	-

5	Bengkel sepeda/sepeda motor	-	-
6	Warung kelontong	5 orang	-
7	Pencari kayu	-	-
8.	Dagang	-	-
9	Buruh tani	-	-
10	Tukang batu	4 orang	-
11	Tukang pijat	-	-
12	Tukang ojek	1 orang	-
13	Tukang kayu	2 orang	-

Dari data pada tabel 7 di atas menunjukkan bahwa warga transmigran pada UPT Suhuyon sebagian besar mata pencahariannya adalah petani yaitu sebanyak 75 orang atau 100 %. Selain bertani, sebagian kecil warga transmigran UPT Suhuyon membuka usaha di bidang warung kelontong sebanyak 5 orang atau 2,4 %, bermata pencaharian sebagai tukang batu sebanyak 4 orang, tukang ojek dan tukang kayu masing-masing sebanyak 1 orang dan 2 orang, nampak bahwa masyarakat UPT Suhuyon kegiatan untuk menambah penghasilan selain bertani tidak ada menonjol atau dengan kata lain harapan satu-satu penghasilan diharapkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya adalah bertani.

4. Mata Pencaharian Penduduk Unit Pemukiman Transmigrasi Betelen

Penduduk UPT Betelen pada umumnya adalah petani, sebagian beternak sapi, babi, anjing, ayam, bebek, perikanan darat dan terdapat beberapa penduduk yang menambah kegiatannya pada industri dan jasa rumah tangga untuk lebih meningkatkan kesejahteraannya, seperti yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel. 8. Data Mata Pencaharian UPT Betelen

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk	Kisaran pendapatan (Rp/tahun)
1	Pegawai negeri	-	
2	Petani	75 kk	
3	Pengrajin tahu-tempe	-	
4	Pengrajin anyaman	-	
5	Bengkel sepeda/sepeda motor	-	
6	Warung kelontong	4 orang	
7	Pencari kayu	-	
8.	Dagang	-	
9	Buruh tani	-	
10	Tukang Kayu	75 orang	
11	Tukang pijat	-	
12	Tukang Batu	25 orang	
13	Mebuler	5 orang	
14	Angkutan Ojek	5 orang	
15	Pembuat gula batu	2 orang	
16	Pembuat cap tikus	6 orang	
17	Pembuat kue	2 orang	

Dari data pada tabel 8 di atas menunjukkan bahwa penduduk UPT Betelen 100% mata pencahariannya adalah bertani dari seluruh jumlah kepala keluarga pada UPT Betelen. Selain bertani, warga transmigran UPT Betelen juga melakukan usaha di bidang industri pembuatan gula aren yaitu sebanyak 2 orang dari jumlah penduduk UPT Betelen, membuka usaha warung kelontong sebanyak 4 orang, usaha pembuatan cap tikus sebanyak 6 orang, usaha pembuatan kue sebanyak 2 orang, dan tukang batu sebanyak 25 orang atau 4,8 % dari seluruh penduduk yang ada di UPT Betelen dan 75 orang atau 14,3 % tukang kayu, kegiatan masyarakat untuk menambah penghasilan selain bertani paling besar adalah tukang kayu kemudian menyusul tukang batu.

8.5. Kondisi Usaha Ekonomi Khusus Usaha Tani

8.5.1. Usaha Tani UPT Lowatag

1. Tanaman Pangan

Tabel 9. Komoditas Tanaman Pangan

Komoditas yang diusahakan	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Total Produksi (Ton/Ha)
1. Padi	20	20	2 Ton
2. Jagung	10	10	1 Ton
3. Kacang Tanah	3	3	800 Kg
4. Kacang Merah	1,5	1,5	600 Kg
5. Kedelai	1,5	1,5	825 Kg
6. Wortel	4	4	750 Kg
7. Kentang	7	7	2,5 Ton

2. Tanaman Perkebunan

Tabel 10. Komoditas Tanaman Perkebunan

Komoditas yang diusahakan	Jumlah Batang (btg)	Jumlah Batang berproduksi (btg)
1. Kelapa	4.700	4.700
2. Kopi	1.261	759
3. Cengkeh	7.150	7.150
4. Vanili	5.250	3.153
5. Coklat	213	200
6. Nira/Seho	713	689

3. Tanaman buah-buahan

Tabel 11. Komoditas Tanaman Buah-buahan

Komoditas yang diusahakan	Jumlah Batang (bh)	Jumlah Batang berproduksi (btg)
1. Mangga	37	31
2. Jeruk	21	19
3. Nangka	27	21
4. Rambutan	13	10
5. Alpukat	27	27
6. Durian	8	5

7. Langsung	20	13
8. Manggis	9	6
9. Pisang	271	256
10. Nenas	189	176
11. Matoa	2	1

8.5.2. Usaha Tani UPT Suhuyon

1) Tanaman Pangan

Tabel 12. Komoditas Tanaman Pangan

Komoditas yang diusahakan	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Total Produksi (Ton/Ha)
1. Padi	23	20	2
2. Sayuran	1	1	-

2) Tanaman Perkebunan

Tabel 13. Komoditas Tanaman Perkebunan

Komoditas yang diusahakan	Jumlah Batang (bh)	Jumlah Batang berproduksi (btg)
1. Kopi	3.800	3.800
2. Coklat	5.675	1.425
3. Kelapa	1.100	650
4. Cengkeh	12.000	6.500

3) Tanaman buah-buahan

Tabel 14. Komoditas Tanaman Buah-buahan

Komoditas yang Diusahakan	Jumlah Batang (bh)	Jumlah Batang berproduksi (btg)
1. Mangga	20	10
2. Jeruk	150	80
3. Nangka	115	35
4. Rambutan	150	80
5. Alpokat	60	45
6. Pisang	1.350	750
7. Jambu Mente	50	40
8. Durian	675	30
9. Nenas	1.150	900

8.5.3. Usaha Tani UPT Pisa

1) Tanaman Pangan

Tabel 15. Komoditas tanaman pangan

Komoditas yang diusahakan	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Total Produksi (Ton/Ha)
1. Padi	30	105	30
2. Jagung	25	150	25
3. Kacang Tanah	2	0	0
4. Kacang Merah	1	0	0
5. Wortel	0,5	0	0
6. Kentang	3	0	0

2) Tanaman Perkebunan

Tabel 16. Komoditas tanaman Perkebunan

Komoditas yang diusahakan	Jumlah Batang (btg)	Jumlah Batang berproduksi (btg)
1. Kelapa	3.000	1.500
2. Kopi	1.500	1.500
3. Cengkeh	25.000	10.000
4. Vanili	10.000	0
5. Nira/Seho	45.000	25.000
6. Coklat	1.500	0

3) Tanaman buah-buahan

Tabel 17. Komoditas Tanaman Buah-buahan

Komoditas yang diusahakan	Jumlah Batang (btg)	Jumlah Batang berproduksi (btg)
1. Mangga	50	25
2. Jeruk	50	0
3. Nangka	1.000	0
4. Rambutan	200	50
5. Alpokat	50	25
6. Pisang	5.000	2.500
7. Durian	1.000	500
8. Nenas	2.500	0
9. Langsat	150	100

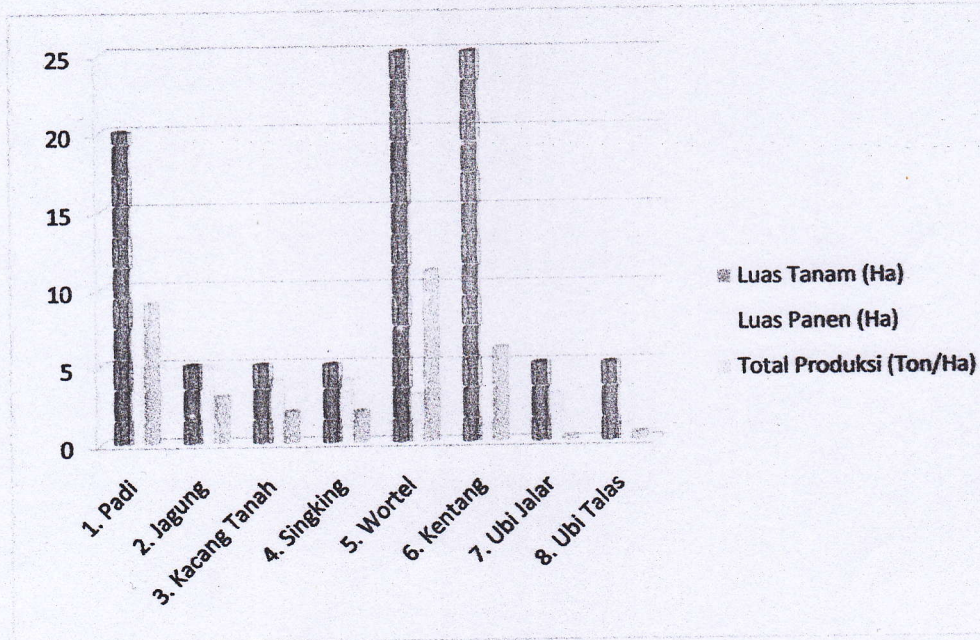
10. Manggis	50	15
11. Matoa	25	0
12. Pepaya	5.000	2.500

8.5.4. Usaha Tani UPT Betelen

1) Tanaman Pangan

Tabel 18. Komoditas Tanaman pangan

Komoditas yang diusahakan	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Total Produksi (Ton/Ha)
1. Padi	20	9	9
2. Jagung	5	5	3
3. Kacang Tanah	5	4	2
4. Singkong	5	4	2
5. Wortel	25	3	11
6. Kentang	25	1	6
7. Ubi Jalar	5	3	0,3
8. Ubi Talas	5	1	0,5



2) *Tanaman Perkebunan*

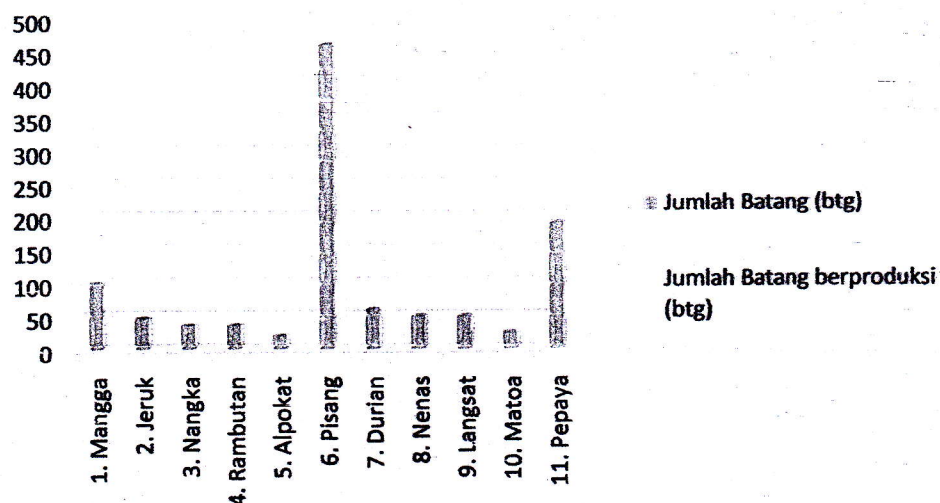
Tabel 19. Komoditas Tanaman Perkebunan

Komoditas yang diusahakan	Jumlah Batang (btg)	Jumlah batang berproduksi (btg)
1. Kelapa	410	216
2. Kopi	360	160
3. Cengkeh	4.900	2.600
4. Nira/Seho	6.010	4.100
5. Jarak	400.000	0

3) *Tanaman buah-buahan*

Tabel 20. Komoditas tanaman buah-buahan

Komoditas yang diusahakan	Jumlah Batang (btg)	Jumlah Batang berproduksi (btg)
1. Mangga	100	0
2. Jeruk	47	0
3. Nangka	36	0
4. Rambutan	36	0
5. Alpokat	20	0
6. Pisang	460	320
7. Durian	60	0
8. Nenas	50	40
9. Langsat	50	28
10. Matoa	25	0
11. Pepaya	190	120



Gambar. Usaha Tani UPT Betelen Komoditas Tanaman Buah-buahan

8.6. Kelembagaan Ekonomi

Adanya Kelembagaan ekonomi yang berfungsi sebagai wadah kegiatan perekonomian desa khususnya yang terkait dengan kegiatan produksi, prosesi dan pemasaran hasil produksi memberikan dampak positif bagi warga transmigrasi misalnya warga transmigrasi lebih mudah dalam memasarkan hasil-hasil produksinya. Pada keempat Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), belum terdapat lembaga ekonomi yang terbentuk kecuali pada UPT Betelen yang sudah membentuk lembaga ekonomi/KUD dimana pembentukan koperasi ini muncul atas inisiatif dan kesadaran warga transmigrasi sendiri dengan latar belakang kondisi lembaga ekonomi/KUD tersebut sebagai berikut :

- a. Nama Koperasi : MEKAHARUAAN
- b. Tanggal Berdiri : 20 Maret 2007
- c. Nomor Badan Hukum : 36/ BH- Kop

- d. Jumlah Pengurus : 5 orang
- e. Simpanan Pokok Anggota : Rp. 100.000 / Anggota

BAB IX

PEMBAHASAN

9.1. Kependudukan Dan Perkembangan Kependudukan

9.1.1. Dari data-data kependudukan pada dua kecamatan yaitu kecamatan Toluaan dan Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara yang terdiri atas empat lokasi UPT yaitu UPT Betelen, UPT Suhuyon, UPT Lowatang dan UPT Pisa menunjukkan bahwa jumlah KK sebesar 151 kepala rumah tangga dengan jumlah anggota keluarga sebesar 627 jiwa pada tahun penempatan 2003 dan pada tahun penempatan 2004 jumlah kepala keluarga sebesar 149 kepala keluarga dengan jumlah anggota keluarga sebesar 607 jiwa berarti total kepala keluarga menjadi 300 kepala keluarga dengan jumlah anggota keluarga sebanyak 1234 jiwa, dan setelah beberapa waktu berikutnya ternyata terdapat warga transmigran yang meninggalkan lokasi sebesar 26 kepala rumah tangga dengan jumlah anggota keluarga sebesar 102 jiwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa persentase warga transmigran yang meninggalkan lokasi sebesar 7% kepala keluarga dan 8% jumlah jiwa. Dengan perkembangan penduduk yang diantaranya dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, pernikahan, meninggalkan lokasi, transmigrasi pengganti dan transmigrasi spontan dari jumlah kepala keluarga menjadi

sebanyak 361 kepala keluarga dengan jumlah anggota keluarga menjadi sebesar 1.634 jiwa.

9.1.2. Struktur Penduduk

Dari data pada tabel struktur kependudukan, 4 UPT pada dua kecamatan lokasi transmigrasi kabupaten Minahasa Tenggara Sulawesi Utara diperoleh data sebagai berikut : Penduduk usia sekolah sebesar 423 jiwa, penduduk usia produktif sebesar 1100 jiwa, dan penduduk usia ketergantungan sebesar 104 jiwa, dengan demikian maka diperoleh persentase rasio penduduk usia ketergantungan sebesar 9 %.

9.2. Fasilitas Umum

9.2.1. Kantor UPT

UPT Suhuyon memiliki 1 buah kantor UPT dalam kondisi yang masih baik, UPT Lowatang memiliki 1 buah kantor UPT dalam kondisi baik, UPT Pisa tidak memiliki kantor UPT, dan UPT Betelen memiliki 1 buah kantor UPT dalam kondisi rusak.

9.2.2. Rumah petugas UPT

UPT Betelen memiliki rumah petugas 1 buah dengan kondisi baik, tidak memiliki rumah Ka.KUPT. UPT Pisa memiliki 1 buah rumah Ka.KUPT dan tidak memiliki rumah petugas, UPT Suhuyon memiliki rumah petugas 1 buah dalam kondisi baik dan tidak memiliki rumah Ka.KUPT, sedangkan UPT Lowatang memiliki 2 buah rumah petugas dalam kondisi baik.

9.2.3. Rumah ibadah

UPT Pisa memiliki 3 buah rumah ibadah dalam kondisi rusak yang merupakan hasil swadaya masyarakat, UPT Lowatang memiliki 2 buah rumah ibadah dalam kondisi baik yang juga merupakan hasil swadaya masyarakat, UPT Suhuyon memiliki 3 buah rumah ibadah dalam kondisi baik (swadaya masyarakat), sedangkan UPT Betelen memiliki 1 buah rumah ibadah dalam kondisi rusak ringan.

9.2.4. Balai desa

UPT Betelen memiliki 1 buah kantor Balai Desa dalam kondisi rusak ringan, UPT Suhuyon memiliki 1 buah Balai Desa dalam kondisi yang masih baik, UPT Lowatang memiliki 1 buah Balai Desa dalam kondisi rusak berat, sedangkan UPT Pisa tidak memiliki Balai Desa.

9.2.5. Puskesmas pembantu

UPT Pisa tidak memiliki Puskesmas pembantu, UPT Lowatang memiliki 1 buah puskesmas pembantu dalam kondisi baik, UPT Suhuyon memiliki 1 buah puskesmas pembantu juga dalam kondisi yang masih baik, sedangkan pada UPT Betelen tidak memiliki puskesmas pembantu.

9.2.6. Gudang

UPT Betelen, UPT Suhuyon, dan UPT Lowatang tidak memiliki gudang, sedangkan UPT Pisa hanya memiliki 1 buah gudang dalam kondisi baik.

9.2.7. Lapangan olah raga

UPT Pisa dan UPT Suhuyon belum memiliki fasilitas lapangan olahraga. Sedangkan pada UPT Lowatang dan UPT Betelen masing-masing sudah memiliki lapangan olahraga.

9.2.8. Tanah Pekuburan

UPT Betelen dan UPT Suhuyon sudah memiliki lahan tanah pekuburan seluas 0,5 ha dalam kondisi baik. Sedangkan UPT Lowatang dan UPT Pisa juga sudah memiliki lahan tanah pekuburan.

9.2.9. Pos Kamling

Ke 4 UPT masing-masing belum memiliki pos Kamling.

9.3. Sarana dan Prasarana

9.3.1. Sarana Jalanan

Sarana dan prasarana sangat penting untuk mendukung kelancaran suatu kegiatan, khususnya sarana jalan yang sangat mendukung kelancaran transportasi keluar atau masuk ke lokasi UPT baik untuk kepentingan bisnis maupun untuk kepentingan umum. Pada keempat lokasi UPT tersebut telah dibangun sarana sebagai berikut :

- UPT Lowatang: jalan poros/penghubung sepanjang 5 km dalam kondisi rusak berat, jalan desa sepanjang 2 km dalam kondisi rusak ringan, tidak ada jembatan, gorong-gorong sepanjang 30 m juga dalam kondisi rusak berat.

- UPT Pisa: Jalan poros/ penghubung sepanjang 5 km dalam kondisi rusak berat, jalan desa sepanjang 3 km dalam kondisi rusak berat, jembatan sepanjang 14 m masih dalam kondisi baik, gorong-gorong sepanjang 18 m kondisinya juga masih baik, dan talud pengaman sepanjang 95 m dalam kondisi baik.
- UPT Suhuyon: Jalanan poros/penghubung sepanjang 1 km dalam kondisi rusak berat, jalan desa sepanjang 1 km kondisinya berbatu-batu, jembatan Sp sepanjang 15 m dalam kondisi darurat, sedangkan gorong-gorong sebanyak 6 buah masih dalam kondisi kondisi baik.
- UPT Betelen: jalanan poros/penghubung sepanjang 12,2 km kondisinya rusak berat, jalanan desa sepanjang 2 km kondisinya rusak berat, jembatan Sp tidak ada, gorong-gorong 40 m masih dalam kondisi yang baik, talud pengaman 452 m kondisi baik, dan saluran drainase 700 m kondisi juga masih baik.

9.3.2. Sarana Ibadah

Kegiatan keagamaan dan ibadah sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan kualitas sumber daya manusia yang sangat diharapkan dapat memberikan kekuatan manusia untuk membentuk diri pribadi seseorang dan kepada seluruh lapisan masyarakat. Pada keempat lokasi UPT di Kabupaten Minahasa Tenggara Sulawesi Utara mayoritas beragama kristen dan sebagian kecil beragama islam, dengan sarana ibadah unruk UPT Suhuyon sebanyak 3 unit gereja dengan kondisi baik

dan tidak memiliki mesjid, UPT Lowatang memiliki 3 unit gereja dan tidak memiliki mesjid, UPT Betelen memiliki 1 unit gereja dan tidak memiliki masjid, sedangkan pada UPT Pisa memiliki 4 unit Gereja dan juga tidak memiliki mesjid.

9.3.3. Sarana Pendidikan

Pendidikan harus merupakan prioritas utama karena dengan pendidikan, baik itu adanya sarana pendidikan formal ataupun non formal seseorang akan memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehingga kemandirian yang mereka miliki dapat semakin lebih baik baik dalam hal mengembangkan diri dan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Pelaksanaan pendidikan sangat ditunjang oleh kualitas tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Pelaksanaan pendidikan harus dapat dilaksanakan di semua daerah di Indonesia mulai dari daerah perkotaan hingga pada daerah transmigrasi terpencil sebagai tujuan upaya peningkatan kualitas SDM. Pengetahuan keterampilan dapat dilakukan melalui pendidikan formal dalam rangka pelaksanaan wajib belajar, sedangkan pendidikan non formal bertujuan untuk merangsang tumbuhnya swadaya kesiapan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui kegiatan pelatihan/kursus dan sejenisnya.

Pada lokasi transmigrasi di Kabupaten Minahasa Tenggara Sulawesi Utara yang terdiri dari 4 UPT, pelaksanaan pendidikan dasar telah berjalan baik dengan fasilitas atau sarana dan prasarana yang cukup

sederhana yaitu pada UPT Pisa memiliki gedung Sekolah Dasar sebanyak 1 unit di mana 3 unit lokal dibangun oleh pemerintah kabupaten Minahasa pada tahun 1990 dengan kondisinya yang rusak berat, UPT Suhuyon memiliki gedung Sekolah Dasar Negeri sebanyak unit 3 lokal. UPT Betelen belum memiliki gedung SD sehingga pendidikan dasar pada UPT Betelen dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas umum yaitu berupa balai desa yang kondisinya juga sudah rusak. Sedangkan pada UPT Lowatang sudah memiliki gedung SD GMIM pada tahun 1975 sebanyak 1 unit, 3 lokal yang kondisinya rusak berat.

9.4. Mata Pencanharian

9.4.1. Masyarakat Transmigrasi pada keempat lokasi UPT di Kabupaten Minahasa Tenggara pada umumnya memiliki mata pencaharian sebagai berikut :

a. Bertani

Dari data pada tabel mata pencaharian ke 4 Lokasi UPT di daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Sulawesi Utara, warga transmigran yang memiliki mata pencaharian sebagai petani sebanyak 275 kepala keluarga dari 300 kepala keluarga atau sekitar 91,7% kepala keluarga dari keseluruhan kepala kepala keluarga pada keempat lokasi UPT Kabupaten Minahasa Tenggara. Adapun tanaman yang yang di tanam yaitu :

- tanaman pangan : padi, jagung, kacang tanah, kacang merah, wortel, kentang dan sayur-sayuran.
 - tanaman perkebunan : kelapa, kopi, cengkeh, vanili, nira/seho, coklat
 - tanaman buah-buahan : mangga, jeruk, nangka, rambutan, alpukat, pisang, durian, nenas, langsung, mangis, matoa, pepaya.
- b. Peternakan yaitu beternak sapi, ternak babi, ternak anjing, ternak ayam, dan ternak itik.
- c. Perikanan : perikanan darat yaitu jenis ikan mas, ikan mujair dan ikan nila.
- d. Jasa / Industri :
- warung/ kios sebanyak 16 kepala keluarga atau sekitar 5,3 %
 - pembuatan gula aren / gula batu sebanyak 69 kepala keluarga atau 23%
 - pembuatan cap tikus sebanyak 15 kepala keluarga atau 5%,
 - pembuatan bata sebanyak 4 kepala keluarga atau 1,3 %
 - Tukang kayu sebanyak 92 kepala keluarga atau 30,6%
 - Tukang batu sebanyak 39 kepala keluarga atau 13 %
 - Tukang jahit sebanyak 7 kepala keluarga atau 2,3 %
 - Tukang kripik sebanyak 5 kepala keluarga atau 1,7 %
 - Penghasil Meubel sebanyak 11 kepala keluarga atau 3,7 %
 - Tukang ojek sebanyak 10 kepala keluarga 3,3 %
 - Pembuat kue sebanyak 5 kepala keluarga 1,7 %

BAB X

KESIMPULAN DAN SARAN

10.1. Kesimpulan

Program transmigrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah sangat besar pengaruhnya atau memberikan dampak positif terhadap pembangunan khususnya di bidang ekonomi kerakyatan. Selain itu juga salah tujuan program transmigrasi adalah agar supaya masyarakat bisa memenuhi penghidupan dan kesejahteraannya sehingga menjadi lebih baik di banding di daerah asalnya, lahan yang tidak produktif bisa menjadi produktif, dapat mengurangi kepadatan penduduk di daerah perkotaan, dapat meminimukan tingkat pengangguran yang secara otomatis menciptakan kestabilan ke arah semakin lebih baik. Suatu program kerja dapat memberikan hasil yang optimal dan maksimal apabila di tunjang oleh organisasi dan sistem pengolahan yang bagus. Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik yaitu sebagai berikut :

10.1.1. Penduduk lokasi transmigrasi dari keempat UPT kabupaten Minahasa

Tenggara Propinsi Sulawesi Utara yang kembali atau meninggalkan lokasi sebanyak 26 KK dengan jumlah anggota keluarga 102 jiwa atau 8,7% kepala keluarga dengan persentase jumlah anggota keluarga sebesar 6 % .

10.1.2. Sarana jalan di lokasi transmigrasi maupun jalan penghubung dengan kota kecamatan sangat tidak mendukung kegiatan perekonomian antara kota kecamatan, kota kabupaten dengan daerah lokasi transmigrasi.

10.1.3. Daerah Transmigrasi merupakan daerah yang sangat potensial dengan lahan yang cukup subur untuk pertanian dan perkebunan. Dari data hasil wawancara dengan pihak pemerintah yang terkait dan masyarakat diperoleh data bahwa tanaman padi sawah dan berbagai macam tanaman perkebunan sayur-sayuran hingga buah-buahan sangat cocok di tanam pada daerah tersebut.

10.1.4. Daerah Transmigrasi juga potensial dikembangkan pada aspek peternakan dan perikanan. Berbagai macam ternak dan pengembangan budi daya ikan darat dan ikan kolam dapat dikembangkan biakkan sehingga hasilnya lebih dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah.

10.1.5. Kelembagaan ekonomi yaitu KUD atau Koperasi yang merupakan wadah kegiatan perekonomian juga dapat membantu masyarakat Transmigrasi pada keempat Unit Pemukiman Transmigrasi. Tapi daerah transmigrasi tersebut belum ada terbentuk KUD kecuali pada UPT Beteken yang sudah membentuk satu KUD.

10.2. Saran-Saran

10.2.1. Dengan adanya data jumlah kepala keluarga dari keempat lokasi UPT kabupaten Minahasa Tenggara Sulawesi Utara yang meninggalkan lokasi transmigran sebanyak 26 kepala rumah tangga dengan jumlah anggota keluarga sebanyak 102 jiwa, olehnya itu disarankan kepada pihak pemerintah setempat, pihak departemen transmigrasi dan instansi yang terkait dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi warga

transmigrasi meninggalkan lokasi transmigrasi tersebut dan dapat mencari solusinya.

10.2.2. Sarana Jalan merupakan fasilitas yang sangat besar pengaruhnya terhadap segala kegiatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya khususnya dalam hal pengembangan kegiatan perekonomian kerakyatan, olehnya itu sangat diharapkan agar pihak pemerintah, pihak transmigrasi dan instansi yang terkait dapat menjadikan prioritas utama untuk pembangunan jalan penghubung antara lokasi transmigrasi dengan kota kecamatan.

10.2.3. Daerah transmigrasi memiliki lahan yang sangat potensial untuk pengembangan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan budi daya ikan kolam. Olehnya itu sangat di sarankan kepada pihak pemerintah, departemen pertanian, departemen peternakan, departemen perkebunan, departemen perikanan dan pihak transmigrasi dapat membantu masyarakat dalam hal pengembangan perekonomian kerakyatan baik sarana jalanan maupun fasilitas lainnya dan modal usaha.

10.2.4. Disarankan agar supaya dapat dibentuk kelembagaan ekonomi yaitu KUD atau koperasi yang dapat digunakan untuk membantu masyarakat transmigrasi dalam hal kegiatan perekonomiannya atau pemasaran hasil-hasil produksi baik dari produksi pertanian maupun dari usaha industri rumah tangga dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abustan, Idrus, Muhammad. 1989. *Gerak penduduk, Pembangunan Perubahan Sosial*. Jakarta: Universitas Indonesia press.
- Ansyari, Fuad. 1976. *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tapanuli Utara. 2007. *Profil Teknologi Pertambangan Sumber Daya Mineral Kabupaten Tapanuli Utara*.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 1990. *Hukum Lingkungan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Mahadevan, K. 1986. *Fertility and Mortality Theory, Methodology and Empirical Issues*.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi. Lembaga Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Munur, Rozy. 1984. *Teknik Demografi*. Jakarta : PT. Bina aksara.
- Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi. (PLTP), Sarulla Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara.
- Sessu. 1994. *Analisis Fertilitas di Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang : Universitas Hasanuddin.
- Sessu. 2007. *Analisis Pengeluaran Konsumen untuk Air Minum dalam Kemasan dan Dampaknya Terhadap Potensi Peningkatan Kesempatan di Sulawesi Selatan*. Makassar : Universitas Hasanuddin.
- Tara, Dainy, Azwir. 2001. *Strategi Membangun Ekonomi Rakyat*. Jakarta : Nuansa madani.